PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN MADURA

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:

Nur Hakim

NIM: F520915027

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Hakim

Nim : F520915027

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecual pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 April 2019
Saya yang menyatakan

Nur Hakim

PERSETUJUAN

Tesis Nur Hakim ini telah disetujui

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. H. SUIS, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nur Hakim ini telah di uji
pada tanggal 16 januari 2019

Tim Penguji:

1. **Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua Penguji)** .....
   NIP.196201011997031002
2. **Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Penguji Utama)** .....
   NIP. 195601031985031002
3. **Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag (Penguji)** .....
   NIP. 197110212001121002

Surabaya, 12 April 2019
Direktur,

Prof. Dr.H.Aswadi,M.Ag
NIP.196004121994031001

Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hakim
NIM : F520915027
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN MADURA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis

(Nur Hakim)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nama	:	Nur Hakim
Judul Tesis	:	Peran Komunitas Pemuda Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Kabupaten Bangkalan Madura
Pembimbing	:	Dr. H. Suis, M.Fil.I
Kata Kunci	:	Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi di bangkalan memiliki banyak komunitas satu di antaranya komunitas pemuda, komunitas pemuda sendiri tergolong banyak organisasi. Ada organisasi yang terstruktur secara nasional sampai ke desa seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ada yang terstruktur secara nasional sampai ke kabupaten kota seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ada pula yang hanya berstruktur lokal seperti Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR), Madura *Corruption Watch* (MCW), *Centre Of Islamic And Democration* Studie's (CIDE), Pemuda Bangkalan Bersatu (PBB),

Temuan korupsi di bangkalan terindikasi pada kuatnya relasi para penguasa lokal, dan hal tersebut menjadi rahasia umum di kabupaten bangkalan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat peran komunitas pemuda dalam memerangi korupsi yang akut di kabupaten bangkalan dengan sector pendidikan anti korupsi. Peneliti menggunakan metodolodi kualitatif dengan model etnografis yang menekankan pada pengalaman dan obyektifitas.

Peneliti fokus pada teori relasi kekuasaan, teori motif sosial dan pendidikan anti korupsi dalam melakukan penelitian, sebab korupsi di kabupaten bangkalan termasuk korupsi yang akut. Korupsi yang terjadi begitu massif dan berjamaah. Bukan hanya pejabat publik pemerintahan kabupaten tetapi sampai pada ke akar rumput. Malah yang lebih parah korupsi sudah menjadi trend dan gaya hidup para pemangku jabatan hal tersebut juga banyak di pengaruhi oleh kuatnya relasi dan ada motif sosial dalam melakukan tindak pidana korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAANKEASLIAN.....…….……..iii

PERSETUJUAN .....……..iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....……v

TRANSLITERASI …….....vi

MOTTO ……..…….....vii

ABSTRAK …….....viii

KATA PENGANTAR …….....ix

DAFTAR ISI …….....xi

BAB I : PENDAHULUAN…….1

A. Latar Belakang Masalah …….……1

B. Rumusan Masalah ……...8

C. Tujuan Penelitian ……8

D. Manfaat Penelitian ……..9

E. Kerangka Teori ……..……..10

F. Penelitian Terdahulu …….…14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian …….18

H. Sistematika Pembahasan ……...21

BAB II : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KOMUNITAS PEMUDA DAN PROGRAMKERJA ……..…22

A. Komunitas Pemuda ……...22

B. Pendidikan Anti Korupsi Dan Teori Relasi Kekuasaan . teori Motif …...29

C. Gerakan Pemuda ANSOR Dan Program Kerja……...…..60

D. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dan Program Kerja……63

E. Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat Dan Dan Program Kerja……....71

F. Madura Corruption Watch dan Program Kerja……..73

G. Centre Of Islamic And Democration Studie's……...…74

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI……...77

A. Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Lembaga-Lembaga Pendidikan……77

B. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Perlawanan Terhadap Korupsi…….…….81

C. Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) dan Kebangkitan Pemuda Dalam Melawan Korupsi ……88

D. Madura Corruption Watch (MCW) Dengan Program Keterbukaan Informasi Public Dan Kesadaran Advokasi……...89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Centre Of Islamic And Democration Studie's dengan Program Keterbukaan Informasi……...90

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA BANGKALAN ……..91

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan ……..91

1. Kasus Korupsi Bangkalan ……...93

2. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pemuda Bangkalan ……..98

B. ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA…… ……...115

1. Relasi Dan Motif Korupsi …….115

2. Implikasi Program Pendidikan Anti Korupsi Komunitas Pemuda Bangkalan……...……121

BAB V : PENUTUP ……...122

A. Kesimpulan …….122

B. Saran……....124

Daftar Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu “kebiasaan” . berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat jelas, namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyandarkan para karuptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut .

Jadi , salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu di pengaruhi oleh “Budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapt merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat kedalam sistem menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apapun.

Adanya KPK sebagai lembaga Negara yang menangani khusus terkait tindak pidana korupsi itu semakin mengafirmasi bahwa negara kita tercinta ini dihuni oleh warga yang korup, permasalahannya bukan karena Negara Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang maupun aturan yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan, sudah banyak Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative dalam mencegah dan menindak para pelaku korupsi, namun entah kenapa korupsi di Indonesia masih saja terjadi dimana-mana.

Problem utama di Indonesia ini adalah ketidakterbukanya sistem dan jalannya pemerintahan, sehingga dengan situasi masyarakat yang tertutup tersebut akan memudahkan para pelaku korupsi melakukan konspirasi-konspirasi korupsi, Bangkalan contohnya Bangkalan adalah sebuah kabupaten di pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, kabupaten Sampang di timur serta selat Madura di selatan dan barat.

Bangkalan merupakan daerah yang tertinggal No. 2 di Jawa Timur dalam masalah SDM, maupun SDA nya, sehingga daerah bangkalan dalam menjalankan roda kepemerintahan sangatlah tertutup, banyak contoh para tokoh di Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah terindikasi korupsi yaitu ketika bupati dua periode FUAD AMIN tertangkap oleh KPK, baik dari golongan ulama, tokoh masyarakat, kaum akademis sampai kepemudanya.

Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan kuburan, dari mulai sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan.

Oleh karena itulah, peran kaum muda sekarang adalah mengikis korupsi sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan pada waktunya nanti, perbuatan korupsi dapat diberantas dari Negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin.

Seperti kasus yang terjadi pada mantan Bupati Bangkalan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ini ditangkat atas dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Tidur. Diduga penyuapan dilakukan Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko melalui perantara pemberi Kopral Satu TNI AL Darmono. Penangkapan Fuad Amin merupakan rangkaian OTT Senin (1/12)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siang hingga Selasa dini hari. Pertama, posisi kasusnya. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Ra'uf sebagai perantara Fuad Amin pada Senin (1/12) pukul 11.30 WIB. Penangkapan terjadi di parkiran gedung AKA di Jalan Bangka Raya No 2, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Kasus itu memberi cerminan bahwa kota santri system dan budaya korupsi masih menggurita. Bahkan anehnya lagi, korupsi dilakukan oleh sosok yang menyandang title Kiai. Hal itu membuktikan bahwa pendidikan anti korupsi pun juga tak memberi efek apa-apa pada budaya potong memotong, setor menyetor uang rakyat oleh pengusaha pada penguasa.

George Soros dalam bukunya open society; reforming global capitalism mengatakan, Negara akan tumbuh subur dan tidak akan terjadi konspirasi jahat apabila system yang dijalankan pemerintah terbuka seluas-luasnya kepada publik[1], dikarenakan dengan system yang terbuka akan berdampak peran monitoring setiap masyarakat. Sebenarnya Indonesia sudah punya UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik namun ternyata masih saja masyarakat kurang faham betul eksekusi dari UU tersebut di Bangkalan.

Begitu juga dalam pendidikan, secara jelas pemerintah melalui kemendikbud telah memasukan pendidikan anti korupsi ke dalam SD, SLTP dan SMA, tapi kenapa karakter bangsa ini masih belum berubah, terutama di Bangkalan.

[1]George Soros. Open society; reforming global capitalism. Bab 5 hal 126. Jakarta 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi di Bangkalan sebenarnya bisa di atasi apabila segenap tokoh dan pemuda mampu memerankan dirinya sebagai taming bagi jahatnya korupsi. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat isu-isu tersebut dengan judul "**PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN**", harapan menemukan formulasi dan skema dalam melawan tradisi korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi Latar belakang di atas, serta untuk memper mudah dan menghasilkan penelitian yang utuh, komprehensif dan sistematis. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana program komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan program komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi?
3. Bagaimana implikasi pendidikan anti korupsi oleh komunitas pemuda di kabupaten Bangkalan Madura?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi riset. Tujuan dari riset ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan komunitas pemuda di kabupaten bangkalan.
2. Menjelaskan hasil suervei peran pemuda dan program pendidikan anti korupsi komunitas pemuda di bangkalan.
3. Mendeskripsikan program-program pemuda dalam manifestasi pendidikan anti korupsi di Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka penulis paparkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana pendidikan anti korupsi pada diri santri sebagai generasi muda Indonesia. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademis kepada civitas UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya, dan kepada mahasiswa jurusan Dirosah Islamiyah konsentrasi Kepemudaan serta perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khazanah intelektual.

2. Manfaat praktis

   Pada segi praksis penelitian ini mampu meningkatkan dan menguatkan pemahaman peran pemuda dan pendidikan karakter anti korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membentuk jiwa generasi muda yang anti korupsi dan melawan ketidakadilan.

Manfaat selanjutnya adalah bagi masyarakat dapat memberikan landasan berpikir, tahapan berpikir, dan implementasi pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk mental pejuang anti korupsi.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menggunakan pendekatan Teori Komunitas, Teori Keterlibatan Publik, TeorinRelasi Kekuasaan, Teori Motif Dan Pendidikan Anti Korupsi.

1. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi ialah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta beberapa nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Oleh sebab itulah pendidikan anti korupsi pada dasarnya ialah penanaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik.[2]

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi disekolah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bagaimana pemuda dapat membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argument yang logis dan rasional kepada korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi.[3]

2. Teori Relasi Kekuasaan

Diskursus mengenai kekuasaan menjadi suatu hal yang tidak pernah basi dan selesai untuk didiskusikan. Hal ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Banyak perspektif tentang kekuasaan, salah satunya para filsuf religious, mereka menghubungkan itu dengan masalah Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdi tujuan negara yang dianggap

[2]Syaiful Amin Ghafur, *Merancang Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 01, No. 01, Juni 2009 ISSN 2085-3033).
[3] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.[4]

Michel Foucault (1926-1984) salah seorang filsuf pelopor strukturalisme juga berbicara tentang kekuasaan. Konsep Kekusasan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.[5]

3. Teori Motif Sosial

Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhan dasarnya.[6]

---

[4] A. Rahman Zainudin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 428.
[5] Steven Best & Douglas Kellner, Teori Postmodern, Interogasi Kritis, Indah Rohmani (Penterj.) (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.
[6]Alvaro Cuervo-Cazurra. (2008). "The Effectiveness of Laws Against Bribery Abroad." Journal of International Business Studies, Vol. 39, Issue 4, 634-651.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut McClelland, individu termotivasi tiga dorongan dasar, yaitu:[7]

a. Motif prestasi (*achievement*) merupakan keinginan untuk mencapai atau melebihi standar. Orang dengan motif prestasi berusaha untuk unggul dari yang lain. Mereka cenderung menghindari situasi baik yang berisiko rendah dan beresiko tinggi. Individu berprestasi menghindari situasi berisiko rendah karena keberhasilan mudah dicapai bukanlah pencapaian yang real.

   Dalam proyek berisiko tinggi, prestasi dipandang sebagai salah satu kebetulan daripada upaya sendiri. Individu tinggi lebih memilih pekerjaan yang memiliki probabilitas keberhasilan sedang, idealnya peluang 50%. Berprestasi membutuhkan umpan balik secara teratur untuk memantau kemajuan *achievements* mereka. Mereka cenderung memilih untuk bekerja sendiri atau dengan rekan berprestasi tinggi lainnya.[8]

b. Motif afiliasi (*affiliation*) adalah keinginan untuk berteman, bekerja sama, dan membina hubungan dekat, Mereka dengan kebutuhan tinggi untuk afiliasi atau bersahabat membutuhkan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan perlu untuk merasa diterima oleh orang lain. Mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok kerja mereka. Individu afiliasi lebih memilih pekerjaan yang memberikan interaksi pribadi yang signifikan. Mereka tampil baik dalam layanan pelanggan dan situasi interaksi klien.

---

[7]David C. McClelland. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: Van Nostrand Company Inc.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Motif kekuasaan. (power) merupakan dorongan untuk mempengaruhi orang lain, untuk memiliki prestise, untuk merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Ada dua jenis dalam motif power:

A. Penelitian Terdahulu

1. Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Oeh Aprillani Arsyad, SH. MH

Pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi diera reformasi, ditandai dengan lahirnya lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien.

KPK dengan segala kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah bekerja dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi yang besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun dalam melaksanakan tugasnya KPK menghadapi kendala antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang belum menunjang. Oleh karena itu perlu dibudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi dalam masyarakat, agar penanggulangan tindak pidana korupsi efektif dan efisien. Untuk itu KPK sebagai ujung tombak, bekerja sama dengan semua komponen masyarakat ; LSM, pers, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membudayakan gerakan anti korupsi dalam rangka penanggulangan korupsi di Indonesia.

Keywords: Membudayakan, Gerakan, Anti Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendidikan Antikorupsi Di IndonesiaOleh :SUPRIYANTA Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Salah satu isu atau masalah yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa danpemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadidi hampir semua bidang dan sektor pembangunan, menyebar tidak hanya di tingkat pusat tetapijuga meluas ke tingkat daerah. Korupsi tidak lagi sebagai suatu fenomena tetapi dikhawatirkansudah mengakar ke seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain sebenarnya sebagian rakyat pada hampir semua kebudayaan mengerti bahwasegala bentuk dan jenis korupsi, suap, pemerasan, dan sebagainya merupakan perbuatan yangmelawan rasa keadilan. Perbuatan korupsi dan perbuatan lainnya yang serupa merupakanpermasalahan mental di mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diabaikan dan lebihdipenuhi oleh masalah-masalah dunia yang cenderung materialistik. Kekhawatiran akan bencanayang diakibatkan oleh perbuatan korupsi muncul dari berbagai elemen masyarakat yang peduliterhadap masalah bangsa dan mencoba untuk mencari solusinya.

Dunia pendidikan sebagai salahsatu pilar yang sangat penting dalam pembangunan manusia juga merasa bertanggung jawabakan fenomena menjamurnya perbuatan korupsi tersebut.Pemikiran pentingnya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikannasional seharusnya dapat diakomodasi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitandengan ini pendidikan berarti harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrument perubahan menuju pada perbaikan sosial.

3. Peran Pemuda Dalam Pemberantasan KorupsiOleh : Alghiffari Aqsa, S.H

KORUPSI

Permasalahan korupsi telah lama dikenal dalam peradaban manusia. Ribuan tahun lamanya manusia direpotkan dengan permasalahan korupsi tersebut, baik dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, Yunani maupun Romawi Kuno. Di dalam Perjanjian Lama, Kitab Eksodus (1200 SM) dikatakan "Waspadalah terhadap uang suap; uang suap dapat membutakan mata orang, walaupun ia seorang yang bijaksana dan hati-hati, dan mengusik keputusan, walaupun ia orang yang adil". Selain itu Isaiah seorang nabi di dalam Perjanjian Lama yang hidup dalam abad ke-8 Sebelum Masehi melukiskan orang yang akan selamat dari malapetaka yang mengerikan ialah orang yang mengatakan kebenaran, menolak penghasilan yang haram dan yang mencampakkan uang suap.

KORUPSI DI INDONESIA

Indonesia disimpulkan berada dalam kondisi gawat korupsi karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan. Praktis tidak ada lagi aparatur negara yang bisa dipercayai di negeri ini, baik Jaksa, Polisi, Hakim, Pegawai Negeri, Pejabat, Anggota Dewan, dan bahkan sudah masuk ke levelan terendah aparatur negara dengan toleransi yang sangat tinggi terhadap perbuatan korupsi. Tidak heran setiap harinya kita selalu disuguhi oleh berita yang membuat banyak orang frustasi terhadap kondisi negara, seperti kriminalisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan KPK, Kasus century, kasus rekening gendut para jenderal, kasus suap pemilihan Gubernur BI, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, "kamar hotel" Artalyta, kasus korupsi lebih 50% kepala daerah, dan berbagai kasus lainnya.

Negara yang kaya seperti Indonesia seharusnya dapat mensejahterakan warga negaranya, namun APBN kurang lebih Rp 1.047,7 Triliun pada tahun 2010 sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan karena lebih banyak dihabiskan untuk anggaran rutin bukan pembangunan, terlebih lagi sangat banyak terdapat kebocoran anggaran. Birokrat, aparat penegak hukum, dan politisi merupakan penikmat kebocoran anggaran terbesar. Tidak heran maka Transparancy International pada tahun 2010 lalu melakukan riset dan mendapatkan bahwa tahun 2010 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah 2,8. Sejajar dengan Negara seperti benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands yang sama-sama punya skor 2,8 dan berada dalam urutan 110. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang skornya lebih baik seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankn makna dari pada generalisasi.[9] Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif ETNOGRAFIS, etnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu[10]

2. Pengumpulan Data
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagian data literatur dan ditunjang dengan beberapa data dari lapangan berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[11] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek atau obyek dalam penelitian ini yaitu Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan

---

[9] Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), Hlm. 14

[10] Marguerite G. Lodico, Dean T. Spaulding, Katherine H. Voegtle, Methods in Educational Research From Theory to Practice (San Fransisco: Jossey Bass, 2006), hlm. 268.

[11] Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[12] Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Sumber data sekunder diperoleh dari hal- hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran online, *browsing* data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan

Sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi yaitu, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[13] Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama serempak. Adapun pengertian dan tujuan dari ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik yaitu tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek- obyek alam yang lain.[14] Jenis observasi yang digunakan dalam penelitin ini

[12]Ibid., Hlm. 91
[13]Ibid., Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Hlm. 330
[14] Ibid., Hlm. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah observasi partisipatif yaitu, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.[15] Peneliti menggunakan observasi adalah untuk menjwab hepotesa catatan catatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.[16] Penggunaan wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal- hal dari subyek data yang lebih mendalam dan menguji hepotesa peneliti, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek lalu subyek menjawabnya dan pada akhirnya hasil wawancara tersebut disimpulkan dan dideskripsikan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laoporan tentang diri sendiri atau self- report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[17] Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini untuk memperoleh kevalidan data dan mengukur kelayakan

[15]Ibid., Hlm. 310
[16]Ibid., Hlm. 317
[17] Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data untuk mengetahui bagaimana Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan menerapkan pendidikan anti korupsi

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah dan sebagainya.

C. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan tesis ini, maka peneliti merumuskan sistimatika pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN : yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, sistematika prmbahasan

BAB II. LANDASAN TEORI : meliputi tinjauan teoritis yang meliputi peran pemuda dan pendidikan Karakter Anti Korupsi, relasi kekuasaan, kekuatan komunitas (civil society). Dan keterbukaan publik.

BAB III. METODE PENELITIAN : berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian,lokasi penelitian., tahap-tahap penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan ke absahan data

BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN : membahas hasil penelitian sebagai berikut: (sesuai rumusan masalah)

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran –saran bagi pihak yang berkepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KOMUNITAS PEMUDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Komunitas

Komunitas merupakan bahasa latin *communitas* yang berarti "kesamaan". Kemudian disebut dengan *communis* yang berarti sama, atau publik. Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme berbagai lingkungan. Dalam komunitas manusia sendiri, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan jumlah kondisi lain yang serupa. Dengan kata lain, komunitas ialah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.[18] Dalam ungkapan yang lain komunitas perupakan sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut, sebab terdapat sebuah kesamaan interest atau values.[19]

Menurut Mac Iver *community* merupakan sebuah istilah sebagai persekutuan hidup atau peguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat

[18]Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja. (2012. Jakarta : Raja Grafindo Persada) 53
[19]Agoes Patub B.N, Modul Seminar "Peran Komunitas Musik Etnik Dalam Agoes Patub B.N" (2011. Yougyakarta : Komunitas Suling Bambu Nusantara)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelomok sosial satu sama lain.[20] Keberadaan komunitas sendiri biasanya disadari oleh beberapa hal :

1. Seperasaan

   Unsur seperasaan muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sebab adanya kesamaan kepentingan

2. Sepenaggungan

   Sepenanggungan diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya

3. Saling Memerlukan

   Unsur yang saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun fisik.

   Menurut Montagu dan Matson terdapat sembilan konsep komunitas yang baik dan kompetensi masyarakat,[21] yaitu :

   1. Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok
   2. Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggung jawab
   3. Memiliki vialibitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri
   4. Pemerataan distribusi kekuasaan

[20]Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota. (1987: Surabaya, Usaha Nasional) 69
[21]Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan (2004: Yogyakarta, Penerbit Gava Media) 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama
6. Komunitas memberi makna pada anggota
7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan
9. Adanya konflik dan *managing conflict*.

Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi[22] yaitu :

1. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunita
2. Menentukan tujuan yang hendak dicapai dan skala proritas
3. Kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan
4. Kemampuan bekerjasama secara resional dalam mencapai tujuan.

Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.[23]

[22]Ibid, 75
[23]Ibid, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitan komunitas yang diartikan sebagai paguyuban atau *gemeinschaft*, paguyuban dimaknai sebagai suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal, biasanya dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, rukun warga dan lain sebagainya.[24]

Ciri-ciri *gemeinschaft* menurut Tonnies ialah hubungan yang intim, privat, eksklusif. Sedang tipe *gemeinschaft* sendiri ada tiga yaitu:[25]

1. *Gemeinschaft by blood,* hubungannya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.
2. *Gemeinschaft of place,* hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi
3. *Gemeinschaft of mind,* hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan.

Menurut Mac Iver keberadaan *communal code* (keberagaman aturan dalam kelompok) mengakibatkan komunitas terbagi menjadi dua :[26]

1. *Primary Group.* Hubungan antara anggota komunitas lebih initim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Misalnya keluarga, suami-istri, pertemanan, guru-murid, dan lainnya

[24]Soerjono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar (1975, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia) 128-129
[25]Ibid, 130-131
[26]Mansur, Desa dan Kota,,,,,,,,,,. 80-81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Secondari Group.* Hubungan antara anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang banyak dan dalam jangka waktu relatif singkat, misalnya perkumpulan profesi, atasan-bawahan, perkumpulan, minat / hobi, dan lainnya.

Dalam hal ini komunitas pemuda anti korupsi Bangkalan dapat dikatagorikan sebagai bentuk *gemeisnchaft of mind* atau didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran untuk melestarikan kesenitan angklung dan menjadi bagian dari *secondari group* dimana komunitas ini terbentuk karena kesamaan minat anggota.

B. Pemuda

Pemuda adalah individu yang dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Terdapat banyak definisi terhadap pemuda, baik definisi secara kisik maupun secara psikis tentan siapa figur yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Sedangkan menurut Taufiq Abdullah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Dalam hal ini, princeton mendefinisikan kata pemuda (*youth*) dalam kamus websternya sebagai

> "*the time of life between childhood and maturity' early maturity' the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality charecteristic of a young person*"

Adapun menurut WHO dalam sarlito sarwono (2008;9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai *young people*, sedangkan remaja atau *adolescence* dalam golongan usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis sendiri (2007;1) "pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lain. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan".

Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentan kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa "pemuda adalah warga negara indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun".

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Taufiq Abdullah (1974;38) ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang menyambung, tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fragmen memiliki arti tersendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.

2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu objek dalam hidup, tentulah memiliki nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Ciri pertama dari pendekatan hal ini melingkupi dua unsur pokok, yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu sendiri. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain :

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru
3. Semangat pengabdian
4. Sepontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia, sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharuan dan progresif.

C. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendidikan anti korupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatan kepedulian warganegara terhadap habaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi ialah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta beberapa nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Oleh sebab itulah pendidikan anti korupsi pada dasarnya ialah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mempu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik.[27]

Departemen pendidikan lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi di sekolah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bagaimana pemuda dapat membedakan antara kejahatan korupsi dengan

[27]Syaiful Amin Ghafur, Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 01, No. 01, Juni 2009 ISSN 2085-3033)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kepada korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi.[28]

Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan antikorupsi ialah :

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untu melawan korupsi

Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagai dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, efektif dan psikomotor pemuda.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri.[29] Beberapa nilai tersebut sebenarnya ada dalam diri masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara pancasila, namun

[28]Ibid,
[29]Budi Dharma, Korupsi Dan Budaya Dalam Kompas. 25/10/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai tergusur oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi.[30]

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di daerah / Bangkalan perlu memperhatikan beberapa hal,[31] antara lain :

1. Pengetahuan Tentang Korupsi

   Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, pemuda perlul mendapatkan berbagai informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada pemuda. Disamping itu pemuda juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek moralitas akan memberikan pemuda wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi pemuda tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.[32]

---

[30]Ibid,
[31]Modern Didactic Center, Anti Corruption Education At School. (2008, Vilnius Lathuania : Gerneish Publishing) 23
[32]Ibid, 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan pemuda mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya, sebab itulah pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pemuda, melainkan informasi itu diperlukan agar pemuda mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi pemuda yang mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya pemuda dapat menentukan prilaku yang akan diperbuatnya.[33]

2. Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap pemuda, sikap merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.

Kesemua elemen tersebut saling berhubungan dan saling bertukar tempat, misanya reaksi afektif dibanyangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Sebab itulah sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja, melainkan juga mengandung hal lainya. Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan periaku mungkin akan merubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Sebab,

[33]Krisna Harahap, Pemberantasn Korupsi Pada Masa Reformasi, (Jurnal of Historical Studies X Juni 2009) 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika memberikan informasi tetang korupsi, pemateri berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu pemuda harus meiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapt dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu.[34]

Disamping itu keterlibatan yang intens dalam aktifitas yang mengandung beberapa nilai anti korupsi juga akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

3. Perubahan Sikap

Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki. Misalnya sikap yang menganggap curang dalam setiap persoalan pemuda adalah hal yang biasa dikalangan pemuda itu sendiri. Hal tersebut akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itulah diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang dapat dipakai dari berbagai sumber. Misalnya untuk membentuk perepsi tentang korupsi yang berlawanan

[34]Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengna persepsi yang dimiliki pemuda dan dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam merubah sikap ialah berdasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, sebab itulah diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinay proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang, sebab itulah jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu yang panjang sikap terseut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskripsikan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing pemuda untuk berfikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Sebab reaksi tersebut disebut dengan *postponement effect* [35], dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

4. Perspektif Moral dan Konvensional

Pendidikan antikorupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial, yaitu moralitas dan konvensi, dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan tersebut menyakitkan bagi

[35]Didantic, Anti Corruption,,,,,,,,,.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, atau membawa kerusakan atau bahkan melanggar rasa kualitas suatu tindakan yang mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal.[36]

Konvensi merupakan norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat diwaktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati dapat menjadi pelanggaran moral sebab menyakiti orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga memiliki logika yang berbeda.[37]

Pendidikan antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konfensional apapun buleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat dari apakah hal tersebut ada dalam norma atau tidak. Perspektif moral lebih sensitif melihat kerusakan yang ditimbulkan atau seseorang, sedangkan persepektif konvensi lebih melihat pada pelanggaran kesepakatan, konsistensi dan ekspektasi dari pemiliki otoritas. Pelanggaran

[36]Harahap, Reformasi,,,,,,,, 54
[37]Ibid, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap prinsip moralitas menimbulkan reaksi afektif yang lebih kuat. Prilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral, maka akan meminta maaf, atau mencoba mencari pembenaran dalam setiap kesalahannya.[38]

Sesuai dengan pembagian pemahaman antikorupsi di daerah pemberian pendidikan merupakan faktor dalam memerangi korupsi mulai dari dini, atau mulai dari daerah terpencil, hingga hal tersebut akan menimbulkan implikasi pada para koruptor dari aspek sosial dimulai dari kesadaran pendidikan anti korupsi.

Mengacu pada tujuan dan target pendidikan antikorupsi di atas, maka pembelajaran antikorupsi hndaklah didisain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami oleh pemuda merupakan pembelajaran yang memberikan makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan menempatkan kesadaran pada komunitas pemuda di Bangkalan, pembelajaran pendidikan antikorupsi merupakan sebuah langkah awal untuk membasmi korupsi di daerah masing-masing, mengingat peran kognisi dalam pembentukan sikap dan prilaku manusia itu sendiri. Dengan pembentukan inilah mampu memperoleh melalui berbagai sumber yang terakumulasi dan disimpan dalam bentuk bagaimana ia diterima, namun pengetahuan yang kuat dan mendalam berasalh dari keaktifan individu dalam membangun makna dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan.

[38]Ibid, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi, yaitu suatu hal yang berguna dan dibutuhkan bagi kehidupan manusia yang menuntut untuk tidak selalu menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Sehubungandengan itu nilai-nilai tersebut haruslah merupakan esensi-esensi, yang terkandung dalam suatu barang serta perbuatan-perbuatan. Sebagai esensi, maka nilai itu tidak memiliki eksistensi, namun ada dalam kenyataan[39].

Nilai-nilai dapat dikatakan mendasari sesuatu barang dan bersifat tetap. Jika orang mengatakan "perdamaian merupakan suatu yang bernilai", maka ia memahami bahwa di dalam hakekat perdamaian itu sendiri terdapat nilai yang mendasari.

Selanjutnya jika nilai dikaitkan dengan istilah pendidikan, maka nilai dapat diartikan sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Pendidikan nilai dalam aplikasinya tidak harus merupakan satu program atau pelajaran khusus, seperti pelajaran menggambar, menulis atau bahasa, tetapi lebih merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu, ketrampilan, teknologi, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, seperti kepribadian, etika, moral dan lain lain. Dengan demikian pendidikan nilai merupakan pengetahuan aplikatif komplek[40].

---

[39] Louis O. Kaffsoff, Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat, Terj. Soenarjo Soemargono,(1996. Yogyakarta : Tiara Wacana)345.

[40] EM. K. Kaswardi, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (1993, Jakarta : PT. Grasindo)3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Agus Wibowo pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi[41].

Jadi pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat.

Korupsi sendiri menurut masyarakat tidak asing dengan istilah korupsi. Korupsi selalu identik dengan pemerintahan atau pejabat. Perlu diketahui meski banyak kejadian bahwa korupsi sering dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tetapi orang selain pihak tersebut juga dapat melakukan korupsi.

Dalam kamus ilmiah populer, korupsi diartikan kecurangan; penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.[42] Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya, degan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

---

[41] Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi,.... 38

[42]Pius A Partanto & M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer,(2004, Surabaya: Penerbit Arkola,) 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jonhson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran-peran, jabatan-jabatan publik atau sumber sumber untuk kepentingan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi yaitu, penyalahgunaan (*abuse*), publik (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*).[43]

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi mula-mula adalah menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang publik yang telah dipercayakan pada dirinya, kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya semata, lama-kelamaan digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal seperti ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat bahkan sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik.

Klifaard memberikan definisi korupsi sebagai berikut: "Korupsi sebagai tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi".[44]

Bracking memberikan definisi korupsi sebagai berikut:

"Korupsi dalam konteks *administrative corruption* atau *bureaucraticcorruption*, *petty corruption*, dan *graft*. Korupsi administrasi atau birokrasi adalah pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri dari

[43] Eko Handoyo,Pendidikan Antikorupsi. (2009, Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya). 16.
[44]Ibid., . 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna dalam menerapkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan hukum. *Petty corruption* merupakan tindakan-tindakan kecil lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri. *Graft* adalah pemanfaatan sumber sumber publik untuk kepentingan individu atau pribadi".

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.[45]

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu:

1. Suap
2. Illegal profit;
3. Secret transaction;
4. Hadiah;
5. Hibah (pemberian);

[45]Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi(2009, Jakarta: Tp) 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. penggelapan;
7. kolusi;
8. nepotisme;
9. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Korupsi memiliki ciri-ciri. Handoyo menyebutkan ciri-ciri korupsi sevagai berikut:[46]

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung korupsi dibalik pembenaran hukum.
5. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
7. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif
8. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999, jenis korupsi dapat diuraikan diantaranya meliputi:

[46]Handoyo, Eko, Pendidikan Antikorupsi. (2009, Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya) 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara,
2. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap,
3. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan,
4. korupsi yang berhubungan dengan pemerasan,
5. korupsi yang berhubungan dengan kecurangan,
6. korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dan
7. korupsi yang berhubungan dengan greatifikasi/pemberian hadiah.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang berlaku dan merugikan negara.
2. Tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu
3. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
4. Penggelapan, suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
5. Pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Privatisasi melalui mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif.

Amien Rais sebagai salah seorang politikus besar Indonesia pada masa reformasi juga memberikan pendapatnya terkait tipologi korupsi. Menurutnya, sedikitnya ada empat tipologi korupsi. Yaitu:

1. Korupsi ekstortif

   Korupsi ekstortifmerujuk pada situasi dimana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (*bribery*) kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan ijin usaha atau mendapatkan perlindungan terhadap usaha yang dijalankan.

2. Korupsi manipulatif

   Korupsi manipulatif merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi perbuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat member uang kepada Bupati, Walikota atau Gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Korupsi nepotistik

Korupsi nepotistikmerujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.

4. Korupsi subvertif

Korupsi subvertif berupa pencurian terhadap kekayaan Negara yang dilakukan oleh pejabat Negara. Berbekal kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan Negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subvertif terhadap Negara, karena Negara telah merugikan besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda Negara.[47]

1. Sebab-Sebab Korupsi

Di Indonesia, korupsi menjadi persoalan pelik dan sulit diberantas. Korupsi terbukti telah menjadi salah satu penyebab signifikan buruknya negara dalam mewujudkan cita-cita sesuai Pancasila dan UUD 1945. Beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain sebagai berikut:[48]

a. Problem Kepemimpinan

Masyarakat Indonesia menganut struktur masyarakat yang bersifat paternalistik, sehingga keteladanan para pemimpin menjadi kata

[47]Syamsul Anwar, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2006, Jakart: Pusat studi Agama dan Peradaban PSAP), 18
[48]Azhar, Muhammad dkk. Pendidikan Antikorupsi. (2004, Yogyakarta:LP3 UMY) 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kunci, karena masyarakat akan mengikuti keteladanan para pemimpin. Jika perilaku seorang figur publik yang diteladani baik, maka masyarakat akan mengikuti perilaku yang baik tersebut, demikian juga sebaliknya. Perilaku korupsi akan tumbuh subur dalam masyarakat, apabila pemimpin masyarakat melakukan korupsi. Dengan demikian maka pemimpin haruslah dapat menjadi teladan yang patut dicontoh bagi yang dipimpinnya.

b. Problem Pengajaran Agama dan Etika

Semua ajaran agama mengajarkan bahwa perbuatan korupsi dan suap menyuap merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori dosa. Tidak ada agama yang mentoleransi perbuatan korupsi, apalagi menganjurkan. Namun pada kenyataannya masalah agama dan penerapan agama hanya di tempat-tempat ibadah saja serta cenderung memisahkan antara kepentingan agama dengan kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Akibatnya ajaran agama tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam hal ini perlu diubah model dan metode atau cara didalam pengajaran agama yang sebenarnya sehingga pemeluk agama dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Latar Belakang Sejarah (Kolonialisme)

Dalam konteks Indonesia, warisan kolonialisme dan masa penjajahan masa lalu memiliki sumbangan yang signifikan, walaupun pada dasarnya telah tejadi perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam menentukan kehendaknya sendiri. Kolonialisme telah menyebabkan bibit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Birokrasi yang diciptakan oleh kolonialisme adalah birokrasi yang mempertahankan budaya patrimonial dan feodalisme dalam bentuk baru. Birokrasi yang demikian ini menimbulkan birokrasi nepotisme yang memberi jabatan atau jasa khusus pada sanak saudara dan sahabat.

Dalam lingkungan yang demikian ini berbuat korupsi dianggap sesuatu yang wajar dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai perbuatan korupsi yang terjadi.

d. Kualitas Pendidikan yang rendah

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka manusia Indonesia dididik menjadi menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab, serta sadar akan hak dan kewajiban setiap warga Negara terhadap Negaranya. Namun adanya kualitas yang rendah maka tujuan pendidikan Indonesia menjadi terbalik sehingga hal ini akan mendorong munculnya praktik korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi dalam hal ini bisa dimulai dari lingkungan pendidikan itu sendiri yang seharusnya mendidik manusia Indonesia malahan secara tidak langsung merusak moral bangsa Indonesia sendiri. Misalnya pada saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah favorit biasanya orangtua rela membayar sejumlah uang kepada pihak sekolah agar anaknya bisa masuk di sekolah tersebut meskipun dengan nilai yang kurang memenuhi syarat.

e. Faktor Kemiskinan dan Gaji yang rendah.

Faktor kemiskinan dan gaji yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Lebih tepatnya, tejadi kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin sebagai faktor pemicu terjadinya korupsi. Keadaan tersebut ditunjang lagi oleh tumbuh suburnya sikap masyarakat yang hedonism dan konsumeristik yang dipengaruhi oleh perilaku pejabat, iklan media, radio dan lain-lainnya.

f. Penegakan Hukum yang lemah dan buruk.

Hukum berfungsi ganda, disatu sisi hukum difungsikan sebagai faktor pencegahan terjadinya korupsi. Pada sisi yang lain, hukum yang lemah dan penegakan hukum yang buruk dan aparat penegak hukum yang korup akan menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Apabila hukum lemah dan penegakan hukum yang buruk tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendali kejahatan, malah justru sebaliknya dikendalikan oleh para pelaku kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang korupsi yang berlaku sekarang ini terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Sistem yang berlaku memberikan ruang bagi penjatuhan pidana yang ringan. Seharusnya dalam pelaksanaan sistem Negara kita jangan ada perbedaan

perlakuan dalam bentuk apapun dan tehadap siapapun.

g. Sistem Kontrol yang tidak efektif

Keadaan kelompok penekan (*pressure group*) atau kontrol sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kelompok penekan muncul karena tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat sipil bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang dan mengkorupsi uang Negara adalah perbuatan jahat terencana yang merugikan rakyat banyak. Sebaliknya, peran minimal dari kelompok ini dapat melegitimasi perilaku korupsi tumbuh subur dan semakin meluas.

Seringkali masyarakat tahu tentang suatu tindak korupsi, tetapi tidak tahu harus mengadukannya kemana dan kepada siapa. Tidak jarang masyarakat juga merasa takut terhadap intimidasi dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi kemudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Struktur dan Sistem Pemerintahan

Struktur dan sistem pemerintahan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: gaji yang rendah dan sistem penggajian yang timpang dan tidak adil, rekruitmen pegawai yang tidak dapat menjaring sumber daya manusia yang terampil dan jujur, mekanisme kontrol yang lemah, promosi dan jenjang karier yang tidak transparan dan cenderung ditentukan atasan, birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien.

Di Indonesia budaya korupsi sudah sangat membudaya bahkan mendarah daging baik korupsi yang dilakukan kecil-kecilan maupun besar-besaran. Menurut Suyahmo penyebab korupsi di Indonesia sifatnya beraneka ragam, yaitu:[49]

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang mungkin meningkat. Gaya hidup dan kebutuhan para pegawai negeri tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima. Mereka cenderung malu dan munder apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan yang serba mewah, karena mereka telah dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang terpandang dan hidupnya serba kecukupan. Oleh karena itulah maka para pegawai negeri mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan korupsi.

[49]Suyahmo.Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum (2006, Semarang: Rumah Indonesia), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kebutuhan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau meluasnya korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi sudah menjadi budaya yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah mendarah daging. Mulai korupsi yang bersifat menyalahgunakan keuangan Negara sampai pada tindakan suap-menyuap. Misalnya membayar sejumlah uang kepada pihak pegawai kelurahan untuk mempercepat pembuatan KTP.
3. Modernisasi, dengan adanya modernisasi maka terjadi perubahan struktur budaya di dalam masyarakat kita yang sebelumnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma tradisional kemasyarakatan yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat menjadi masyarakat modern yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya dan selalu berkeinginan hidup dengan segala kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat. Kondisi semacam ini menjadikan peluang empuk untuk melakukan tindakan korupsi didalam masyarakat.

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu:

1. Motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.
2. Motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.[50]

[50]Syamsul Anwar , Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2006, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi.
2. Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral.
3. Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens.
4. Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.
5. Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).[51]

Menurut Suyahmo akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah sebagai berikut:[52]

1. Perilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan. Dengan adanya korupsi maka kegiatan pemerintah yang

[51]Azhar, Muhammad dkk. Pendidikan Antikorupsi.(2004, Yogyakarta:LP3 UMY), 44.
[52]Suyahmo,Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum (2006, Semarang: Rumah Indonesia) 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan biasa gagal dikarenakan dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya.

2. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras sembako yang aslinya diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras tersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi.
3. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnyadipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan umum. Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang tercela.
4. Kalau golongan elit dianggap bersikap korupsi secara luas dan mendalam, maka rakyat kecil tidak akan menjumpai alasan ia pun tidak akan berusaha apa saja yang membawa keuntugan bagi dirinya. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang pemimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang pemimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang sama. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi karena kemunngkinan besar akan dicontoh oleh rakyat kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya yang menyolok soal pajak. Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh negara.
6. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap para pejabat pemerintah, timbul keinginan akan hubungan khusus guna mengumpulkan "bobot" yang cukup untuk membayar tuntunan yang sama dari golongan lain.
7. Karena korupsi merupakan tindakan tidak adil yang telah dilembagakan terhadap orang dengan sendirinya timbul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam.
8. Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat.

Menurut Sudjana, korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan jasa pelayanan publik yang buruk dan kurang memuaskan. Akibatnya pembangunaan nasional akan terbengkalai karena dana operasionalnya dikorupsi oleh pejabat publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini biasa dikatakan sebagai dampak tidak langsung dari korupsi. Dampak tidak langsung lainnya adalah hilangnya kepercayaaan masyarakat terhadap pemerintah, adanya perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas.[53]

Dengan adanya korupsi maka masyarakat menjadi amoral karena tidak dapat membedakan lagi mana perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Selain itu korupsi juga dapat menjadikan masyarakat kita sebagai penipu dan menimbulkan ketidakpekaan rasa sosial dan memandang penderitaan masyarakat sebagai hal yang biasa.

Tindakan korupsi dapat berakibat sebagai penghambat pembanginan nasional dan perkembangan kegiatan usaha. Korupsi juga menimbulkan kenaikan biaya ekonomi artinya harga penjualan barang dan jasa menjadi naik karena setiap kegiatan ekonomi harus terlebih dahulu melewati korupsi. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat terutama rakyat miskin sehingga dapat meningkatkan tindakan kriminalitas.

D. Teori Relasi Kekuasaan Dan Motif

1. Teori Relasi Kekuasaan

Diskursus mengenai kekuasaan menjadi suatu hal yang tidak pernah basi dan selesai untuk di diskusikan. Hal ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada

[53]Handoyo, Eko, 2009. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya, hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Banyak perspektif tentang kekuasaan, salah satunya para filsuf religius, mereka menghubungkan kekuasan itu dengan Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdi tujuan negara yang dianggap agung dan mulia, yaitu kebaikan, kebajikan, keadilan, kebebasan yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.[54]

Michel Foucault (1926-1984) salah seorang filsuf pelopor strukturalisme juga berbicara tentang kekuasaan. Konsep Kekusasan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.[55]

Adanya relasi akan lahir kekuatan yang akan melegitimasi kehendak. Seperti yang dikatakan nitczhe bahwa naluri manusia mempunyai kehendak untuk berkuasa. Sebab itu M Foucault melahirkan sebuah teori relasi kekuasaan. Teori itu menjadi jawaban bahwa kekuasaan selama ini yang terjadi merupakan kombinasi dari relasi dan kehendak berkuasa

Foucault mengemukakan teorinya mengenai wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur: aturan, praktik yang menghasilkan pernyataan

---

[54] A. Rahman Zainudin, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 428.
[55] Steven Best & Douglas Kellner, Teori Postmodern, Interogasi Kritis, Indah Rohmani (Penterj.) (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna pada satu rentang historis tertentu. Ia berpendapat bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19. Ciri kekuasaan pada saat itu, ada yang cenderung brutal, dioperasikan secara terus-menerus, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh dengan simbolisme, dan yang terakhir berada di ruang publik.

Kekuasaan, menurut Foucault, bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di mana-mana kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam.[56]

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault menguatkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan yang menyediakan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

Menurut Michel Foucault, ketika sebuah wacana atau kebijakan dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana atau kebijakan itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan

[56]Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan. (Yogyakarta:Kanisius), 2005, hal. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan.

Ia menempatkan kebenaran, rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, pengobatan, pendidikan, rumah sakit, manusia dan sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu serta memproduksi kebenaran. Kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada dalam kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kebenaran.[57]

Foucault memahami ilmu pengetahuan sosial dapat menjadi alat penguasaan manusia atas manusia, artinya untuk mengendalikan dan memengaruhi putusan (tubuh dan jiwa) orang lain, sehingga terjadilah dwitunggal kekuasaan-pengetahuan. Tubuh dilihat sebagai "mesin hidup" (*man-the-machine*) sebagai sumberdaya dan tenaga kerja yang perlu dikendalikan dan dimanfaatkan guna kemajuan.

Posmodernisme Foucault menawarkan pandangan berharga tentang kontrol sosial. Para sosiolog sangat terbantu dalam melihat perilaku menyimpang dalam hal pengalaman dan makna yang mengkonstruksinya. Pandangan Foucault sangat sesuai dengan abad informasi dewasa ini yang menganggap bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai dasar yang

[57] Zainudin, Kekuasaan dan Negara…, 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Dengan kata lain keduanya memiliki keterkaitan yang berkesinambungan dan sangat kuat.[58]

Sederhananya kekuasaan menciptakan pengetahuan, pengetahuan melahirkan kekuatan, kekuatan melahirkan relasi, relasi melahirkan kekuasaan, serta kekuasaan saling memengaruhi secara langsung satu sama lain. Dengan demikian, ideologi yang diterapkan penguasa merupakan peta-peta makna yang meski berpotensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang mengelabui dan melanggengkan kekuasaan.

Ilustrasinya, di setiap ada kekuasaan maka dengan landasan legitimasi powernya akan menelurkan banyak hal yang dengan mudah bisa menguntungkan pribadi maupun kelompok penguasa, disamping meski pada kenyataannya dikhususkan untuk hajat orang banyak. Adanya teori relasi kekuasaan dari M Faucoult ini menjadi suatu titik terang bagaimana kekuasaan itu bekerja dan kekuasaan itu berbuat, sehingga perlu adanya kontrol sosial agar kekuasaan tidak terdistorsi dengan perilaku-perilaku penyimpang.

2. Teori Motif Sosial

Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Motivasi dapat

[58] K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis (Jakarta: Gramedia, 2001), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didefinisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhan dasarnya.[59]

Menurut McClelland, individu termotivasi tiga dorongan dasar, yaitu:[60]

d. Motif prestasi (*achievement*) merupakan keinginan untuk mencapai atau melebihi standar. Orang dengan motif prestasi berusaha untuk unggul dari yang lain. Mereka cenderung menghindari situasi baik yang berisiko rendah dan beresiko tinggi. Individu berprestasi menghindari situasi berisiko rendah karena keberhasilan mudah dicapai bukanlah pencapaian yang real.

   Dalam proyek berisiko tinggi, prestasi dipandang sebagai salah satu kebetulan daripada upaya sendiri. Individu tinggi lebih memilih pekerjaan yang memiliki probabilitas keberhasilan sedang, idealnya peluang 50%. Berprestasi membutuhkan umpan balik secara teratur untuk memantau kemajuan *achievements* mereka. Mereka cenderung memilih untuk bekerja sendiri atau dengan rekan berprestasi tinggi lainnya.[61]

e. Motif afiliasi (*affiliation*) adalah keinginan untuk berteman, bekerja sama, dan membina hubungan dekat, Mereka dengan kebutuhan tinggi untuk afiliasi atau bersahabat membutuhkan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan perlu untuk merasa diterima oleh orang lain. Mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok kerja

[59]Alvaro Cuervo-Cazurra. (2008). "The Effectiveness of Laws Against Bribery Abroad." Journal of International Business Studies, Vol. 39, Issue 4, 634-651.
[60]David C. McClelland. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: Van Nostrand Company Inc.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Individu afiliasi lebih memilih pekerjaan yang memberikan interaksi pribadi yang signifikan. Mereka tampil baik dalam layanan pelanggan dan situasi interaksi klien.

f. Motif kekuasaan. (power) merupakan dorongan untuk mempengaruhi orang lain, untuk memiliki prestise, untuk merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Ada dua jenis dalam motif power:

1) pribadi: Mereka yang membutuhkan kekuatan pribadi ingin mengarahkan orang lain
2) kelembagaan Orang yang membutuhkan daya institusional (juga dikenal sebagai kekuatan sosial) ingin mengatur usaha orang lain untuk memajukan tujuan organisasi. Manajer dengan kebutuhan tinggi untuk daya kelembagaan cenderung lebih efektif dibandingkan dengan kebutuhan tinggi untuk kekuasaan pribadi.[62]

E. Gerakan (GP) Ansor Dan Program-Programnya

Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca-Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Serbaguna) sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G 30 S/PKI, peran Ansor sangat menonjol.

[62] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi ”konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, “ulama besa” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Program Kerja GP Ansor

No	Nama Kegiatan	Tujuan/Sasaran
I.	**PENGURUS HARIAN**	
	1. Ta'aruf Pengurus PAC	Mengenal personalia pengurus
	2. Pelantikan dan Raker	Merumuskan Program kerja
	3. Turba dan pembenahan PR	Pembenahan PR
	4. Rapat PH,Pleno,Pleno Lengkap	Koordinasi & Konsolidasi Prog
	5. Pemetaan Ranting	Memetakan kondisi faktual PR
	6. Sosialisasi PD PRT dan PO	Memahami PD/PRT/PO Ansor
	7. Pendataan potensi anggota (KTA)	Mengetahui Potensi anggota
	8. Konferensi Anak Cabang	Pertanggungjawaban PAC
II.	**LEMBAGA**	
	A. EKONOMI, ADVOKASI &	
	PEMBERDAYAAN MASY.	
	1. Perintisan Usaha Ekonomi	Merintis Usaha Ekonomi
	(Koperasi)	
	2. Penyuluhan/Advokasi Masy	Pemahaman & Penyadaran
	berkaitan isu-isu aktual	Anggota dan Masyarakat
	B. PENDIDIKAN, KADERISASI	
	INFORMASI, IPTEK DAN	
	KAJIAN STRATEGIS	
	1. PKD	Meningkatkan kapasitas kader
	2. Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan skill/wirausaha
	(Lifeskill)	
	3. Pembuatan Weblog Ansor	Mewujudkan Sarana Info
	4. **sosialisasi Bahaya narkoba dan Korupsi**	Mewujudkan masyarakat sehat dan anti korupsi
	Informasi & Telekomunikasi	
	5. Kajian Tematik actual, penidikan. ekonomi, politik dan ancaman negara	Meningkatkan intelektualitas dan karakter
	6. Penerbitan Buletin	Mewujudkan sarana informasi
	C. AGAMA DAN IDEOLOGI	
	1. Rijalul Ansor	Menguatkan Aswaja
	2. PHBI	Menjaga tradisi NU
	3. Training & Pendataan Da'i Muda	Merekrut da'i muda potensial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan dan Program kerja

Kelahiran PMII menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tantangan jaman : pertama, carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia yaitu kurun waktu 1950 – 1959 , tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang undangan yang ada, dan pisahnya NU dari MASYUMI serta tidak enjoynya lagi mahasiswa NU bergabung dengan HMI karena kedekatan politik dan aktifitasnya lebih condong ke Masyumi – bahkan mereka berkampanye untuk partai Masyumi, sehingga masyarakat mengidentikanHMI dengan" anak Masyumi ". Kedua, dinamika internal yang muncul dikalangan intelektual muda NU, kegelisahan dan keinginan kuat dari mereka untuk mendirikan organisasi sebagai wahana menyalurkan aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU serta adanya hasrat kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang beridiologi Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Pada awalnya berdiri IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul 'Ulama') pada bulan Desember 1955 di Jakarta yang dipelopori wakil Haris Sugianto. Sedangkan di Surakarta beberapa mahasiswa NU yang dimotori Mustahal Ahmad mendirikan keluarga mahasiswa Nahdlatul 'Ulama' (KMNU). Akan tetapi, keberadaan IMANU dan KMNU ini ditentang keras oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul 'Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(IPNU) maupun oleh PBNU dengan alasan IPNU baru berdiri pada tanggal 24 pebruari 1954 di Semarang. IPNU beranggapan bahwa berdirinya kedua organisasi tersebut terlalu dini, karena masih sedikitnya jumlah mahasiswa Nu diperguruan tinggi serta adanya kekhawatiran kalau IMANU dan KMNU akan meninggalkan dan menggerogoti eksistensi IPNU.

Gagasan untuk membuat wadah sebagai penyaluran aspirsi bagi mahasiswa NU pada Mu'tamar ke – 2 IPNU di Pekalongan 1-5 Januari 1957 kembali menjadi perbincangan hangat. Namun gagasan tersebut kembali ditentang karena organisasi itu hanya akan menjadi pesaing IPNU. Dan pada Mu'tamar NU ke-3 di Cirebon tgl 27-31 desember 1958 dibentuklah departeman Perguruan tinggi sebagai upaya kompromistis atas ditolaknya pendirian organisasi mahasiswa NU. Sebagai ketua pertama badan otonomi IPNU ini adalah Ismail Makky mahasiswa senior fakultas Syari'ah PTAIN Yogyakarta. Namun dalam perjalananya, antar IPNU dan departemen perguruan tingginya sering terdapat ketimpangan dalam melaksanakan program organisasi. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya cara pandang yang diterapkan para mahasiswa dengan pelajar yang menjadi pimpinan organisasi serta tidak bebasnya para mahasiswa un tuk melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PPIPNU. Sehingga usulan legalisasi atau pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semangat yang tak pernah padam dari kalangan mahasiswa NU, mengalami puncaknya pada konferensi besar IPNU yang pertama pada tgl 14-17 Maret 1960 di Kali urang Yogyakarta sehingga Konbes tersebut menghasilkan sebuah keputusan penting yaitu berdirinya organisasi mahasiswa NU secara khusus diperguruan tinggi. Untuk merumuskan keputusan tersebut dan menindak lanjutinya dibentuklah tim yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU se Indonesia untuk mempersiapkan musyawarah mahasiswa NU dalam waktu satu bulan. Tokoh-tokoh tersebut adalah A. Cholid Mawardi (jakarta), M. Said Budairy (Jakarta), M. Shabich Ubaid (Jakarta), Makmun Syukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismail Makky (Yokyakarta), Munsif Nachrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidi, BA (Surakarta), Laili Mansur (Surakarta), Abdul Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Chalid Narbuko (Malang), dan Ahmad Husain (Makasar). Selain 13 tim tersebut KonBes juga mengutus tiga orang yaitu Hisbullah Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk berkonsultasi dengan KH. Idham Chalid yang sekaligus ketua umum PBNU.

Melalui musyawarah mahsiswa NU tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 april 1960 disekolah muaamalat NU Wonokromo Surabaya. Yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Maksar dan sejumlah perwakilan senat mahasiswa dari perguruan tinggi yang bernaung dibawah NU. Dalam musyawarah tersebut terjadi sebuah perdebatan nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi yang akan didirikan ini. Mahasiswa jakarta mengusulkan nama IMANU, Yogyakarta mengusulkan nama persatuan atau himpunan mahsiswa ahlusunnah wal jamaah atau perhimpunan mahasismwa SUNI sedangkan dari bandung yang didukung Surakarta mengusulkan nama PMII. Akhirnya PMII disepakati menjadi nama organisasi yang akan didirikan. Tetapi kembali terjadi perdebatan persoalan kepanjangan PMII.”P” dalam PMII ada yang mengartikan persatuan atau perhimpunan. Maka musyawarah memutuskan PMII berkepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesisa.

Selain itu, musyawarah juga menghasilkan rumusan peraturan dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta memilih sahabat mahbub junaedi sebagai ketua umum, A. Kholid mawargi sebagai wakil ketua dan Said Budairi sebagai sekretaris umum. Serta ketiga orang tersebut diberi wewenang untuk menyusun kelengkapan pengurus pusat PMII sedangkan pendeklarasian secara resmi PMII tanda 17 april 1960 / 17 syawal 1379.

Filosofi, Asas Dan Tujuan PMII

Awal kata “P” dengan kepanjangan porgerakan adalah sebagai satu bentuk penegasan bahwa PMII sebagai organisasi yang tidak hanya grubyak grubyuk atau sebagai tempat berhimpun, berkumpul yang terbesar stagiman tapi sebagai organisasi yang progresif dan selalu dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata “mahasiswa” adalah sekelompok generasi muda yang kritis, mempunyai tanggung jawab intelektual, kebangsaan program dan indifidu dengan tetap memegang idealisme sebagai alat perjuangan.Kemudian kata “Islam” bermakna satu tata nilai keselamatan bagi seluruh alam, dengan landasan atau pijagan ahli sunnah wal jamaah sebagai manhaj alfikr yang dinamis dan ekletik.

Sedangkan kata dengan”Indonesisa” mempunyai makna bangsa dengan satu pemahaman negara kesatuan republik indonesia yang pluralistik. Maka komitmen berislam bagi PMII sebagai organisasi siswa yang progresif adalah sebuah keniscayaan untuk meneber nilai – nilai universal islam bagi terwujudnya tataran seluruh alam. Dalam petanya dengan Indonesia PMII akan mengembangkan potensi-potensi, nilai-nilai islami yang sudah ada tanpa harus melakuakan islamisasi atau mengaraban Indonesia bahkan menjadi missionaris fundamentalisme yang ekstreem. Karena PMII mencita-citakan sebuah tata kebangsaan, yang berbudi

a) Program Kerja PC PMII kab Bangkalan Masa Khidmat 2017-2018

BIDANG PENGKADERAN DAN ORGANISASI

1.Menyelenggarakan PKL tingkat regional/nasional

2.Menyelenggarakan Lokakarya Pengkaderan tingkat PC PMII Kab.Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.Musyawarah Pimpinan Cabang

BIDANG JARINGAN & INFORMASI

1.Mengembangkan&memperkuat jaringan (OKP, Ormas, LSM dan BEM)

2.Menyelenggarakan Dialog lintas organ

3.Mengadakan kerjasama dengan ormas lainnya

4.Mengadakan audiensi dengan instansi

5. Menggalang donatur tetap

6. Mengadakan polling isu-isu kontemporer di Kab. Bangkalan

7. Mengadakan jaringan internet (blog/web site PC PMII Kab.Bangkalan)

BIDANG KAJIAN

1. Membentuk forum konsentrasi kajian

2. Menyelenggarakan kajian rutin internal PC PMII Kab.Bangkalan

3. Menyelenggarakan Diskusi Terbuka Lintas organ kemahasiswaan, OKP, dan Ormas (Dialektika Nusantara)

4. Bedah buku rutin

5. Sekolah Analisa Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Seminar Nasional/Dialog Kebangsaan

7. Pengajian Budaya

BIDANG PENGEMBANGAN PT

1. Membuat Data base PT di Kab.Bangkalan, Kota Cimahi, dan Kab.Bangkalan

2. Road to campus

3. Merumuskan strategi, pengupayaan berdirinya Komisariat, terutama di kampus berbasis umum.

4. Merumuskan strategi, pengupayaan berdirinya PC PMII persiapan Kab.bangkalan Barat dan Kota Cimahi

5. Pertemuan BEM Se-Kab.Bangkalan

6. Festifal Kreatifitas Pelajar dan Mahasiswa

7. Menanggungjawabi konsolidasi gerakan mahaasiswa Kab.Bangkalan

8. Pelatihan Kepemimpinan PMII for Presma

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

2. Mengadakan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyelenggarakan Sanlat Pelajar se-Kab.bangkalanplus Kampanye Sosial Anti Narkoba Dan Pendidikan Anti Korupsi

4. Mengadakan Kemah Bakti Mahasiswa

5. Menyelenggarakan Workshop Dakwah Multikultural bekerjasama dengan instansi terkait

Lembaga Advokasi, Hukum dan HAM

1. Diklat Advokasi dan HAM se-Jabar

2. Advokasi terhadap kelompok2 masyarakat marginal (kasus hukum dan HaM)

3. Stusi dan advokasi produk hukum

Lembaga Penerbitan, Pers dan Jurnalistik (LP2J)

1. Penerbitan majalah dwi bulanan

2. pelatihan jurnalistik

3. Penerbitan buletin mingguan

4. Penerbitan jurnal ilmiah

5. Road show ke media

6. Talkshow dan diskusi interaktif di radio dan TV lokal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penerbitan buku

8. Langganan koran dan klipingisasi

Lembaga Pengembangan Ekonomi

1. Pelatihan kewirausahaan

2. Menadakan pendidikan life skill (percetakan, sablon, rakit komputer, dsb)

3. Pembentukan badana usaha (kopersi, toko buku, rental komputer, dll)

Lembaga Seni dan Budaya

1. Gelar Seni dan Budaya Rakyat

2. Mimbar Ekspresi seni Kader (per bulan

E. Gelora mahasiswa penyelamat rakyat

Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela [63]

Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatornya sebagai berikut

1. Kordinator kampus UTM : Bahiruddin
2. Kordinator kampus UINSA surabaya : Nurhakim
3. Kordinator kampus STKIP bangkalan : muhlis ali wafa
4. Kordinator STITAL bangakaln : Subaidi Abdillah
5. Kordinator kampus STITMU bangkalan : M syahril
6. Kordinator kampus STAMIDIYA bangkalan: Zubair

Adapun program program GEMPAR sebagai berikut :

1. Melaukan mimbar demokrasi. Dalam upaya kritik social dan menghancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyalis fuad amin
2. Melakukan demonstari terhadap DPRD agar memakzulkan atau mencopot Makmun Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merupakan putra fuad amin dan menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga melakukan praktek korupsi dengan sang ayah [64]

[63] Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017
[64] Wawancara dengan bahirudin pada tanggal 28 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan diskusi public tentang pemotongan generasi koruptif dengan pihak APH, baik polisi maupun kejaksaan,

1. Madura corruption watch (MCW)

MCW adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan Pemuda yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya memutus mata rantai kejahatan latin korupsi dan mempunya Misi

"memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila.Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerinta"

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktrur MCW sebagai berikut :

1. Direktur : Syukur sabidin
2. Wakil direktur : M sholeh
3. Sekretaris : maratus solehah
4. Bendahara : Muhammad yusuf
5. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
6. Kordinator litbang : syaifullah
7. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun program MCW merupakan program yang Fokus pada permasalahan korupsi, seperti halnya :

1. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
2. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan norma, hokum,maupun juklak dan juknisnya program tersebut, contoh meminta RAB,SPJ dan bentuk eksekusi dari realisasi program pemerintah[65].
2. CENTRE OF ISLAMIC AND DEMOCRATION STUDIE'S (CIDE)

   CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman,

   Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organic, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan ABPD, penetapan APBD sampai pada tahap impelementasi dari program-program ABDP[66]

[65] Wawancara dengan direktur MCW Syukur sabidin pada tanggal 22 oktober 2017 di kabupaten bangkalan
[66] Wawancara dengan ketua cide. M shoim pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bagkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi [67]

Adapun struktur CIDE kabupaten bangkalan sebagai berikut:

Pembina : Mathur husyairi

Pelindung : fauzan ja'far

Dewan pertimbangan : Hosun

1. Ketua : M soim
2. Wakil ketua : Nur hakim
3. Sekretaris : M ruji
4. Bendahara : umar jagat ali ulhaq
5. Devisi intelektual : toyyib
6. Devisi litbang : Eko wahyudi
7. Devisi advokasi : rofi'I
8. Devisi humas : mahsus ahmad

Adapun program-program cide tentang pendidikan anti korupsi sebagai berikut[68] ;

[67] Wawancara dengan sekretris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan
[68] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara melakukan investigasi program-program pemerintah yang terindikasi korup
2. Melakukan sosialisasi dan pendidikan korupsi terhadap para pemuda. Baik SMP, SMA sampai Mahasiswa
3. Melaporkan dan mengawal tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan dan kepolisian
4. mengkampanyekan politik, jujur dan adil tanpa sogok menyogok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA BANGKALAN

A. GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Gerakan pemuda ansor merupakan salah satu badan otonom nahdlatul ulama, organisasi GP Ansor merupakan organisasi yang terstruktur dari tingkat pusat Dewan pengurus pusat (DPP) yang ada dijakarta, mempunyai dewan pimpinan wilayah di setiap provinsi se indonesia, mempunyai pengurus cabang di setiap kabupaten se indoneisa sampai ke ranting-ranting di setiap kelurahan dan desa,

Adapun strukturnya gp ansor di kabupaten bangkalan sebagai berikut

I. PENGURUS HARIAN

Ketua	: H. HASANI ZUBAIR, S.IP., M.KP
Wakil Ketua I	: H. FAHAD MUHAMMAD
Wakil Ketua II	: H. MUZAWWIR, M.Th.I
Wakil Ketua III	: H. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA
Wakil Ketua IV	: H. MAKINUN AMIN
Wakil Ketua V	: ABD. MUNIB, M.Pd.I
Wakil Ketua VI	: SUPANDI AZZAURI
Wakil Ketua VII	: ASIS, S.IP
Wakil Ketua VIII	: H. MOH. HOLIFI, M.Pd.I
Sekretaris	: ALI MUSTOFA, M.Pd.I
Wakil Sekretaris I	: RIFQY ALI FAHMI, S.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Sekretaris II : SAMSUL ARIFIN, SE

Wakil Sekretaris III : YUNUS MANSUR YASIN, S.Pd

77

Wakil Sekretaris IV : BADRUN, S.Sos

Wakil Sekretaris V : MUJIBUL KHOIRI, S.Sos

Wakil Sekretaris VI : SYAFI'I, S.Pd.I

Wakil Sekretaris VII : ACH. ZAINAL ABIDIN

Wakil Sekretaris VIII : AHMAD SYAKIR, S.Pd

Bendahara : MAHFUDZ ARIFIN, S.Ag

Wakil Bendahara : M. WAHYU, ST

Wakil Bendahara : RAHMAD, SE

Wakil Bendahara : MOCH. MAHRUS ALY

II. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

a. MASHUDI, SH, MH

b. ROHIM, SH, MH

c. MUHLIS, SH, MH

d. HAJATULLOH, SH, MH

2. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi

a. SANUSI, S.Pd.I

b. A. MUTAMTAM

c. EFENDI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. AHMAD BBUSTANURRIDO, SE

e. H. ABD. ROHIM, SE

3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi

a. HAMIMUDDIN

b. HUSNI SYAKUR

c. ZAINUN NASIHIN

d. MANAB

4. Departemen Informasi, Iptek dan Kajian Strategi

a. ZAIRIL MUNIR

b. SALMAN AL-FARISI, S.Kom

c. ABD. RAHMAN, ST

d. SURYADI, S.Pd.I

e. NUR HADI MUHNI

5. Departemen Lingkungan Hidup

a. RAFLI

b. NIZAR

c. JAMHARI

d. NASIHUL ABROR

e. MAHSUS, S.Pd.I

6. Departemen Olahraga dan Kebudayaan

a. M. ARIF ISMAIL

b. TOLIP, S.Pd.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. KHOLID, M.HI

d. SELI, S.S

e. H. MAHRUS

7. Departemen Agama dan Ideologi

a. H. IMAM MUSLIM

b. H. MUDI

c. H. M. SOLEH

d. MUDABBIR MASHUDI

e. H. ABD. AZIZ

III. SEMI OTONOM

1. Satkocab Banser

Kepala : ABD. QODIR

Anggota:

a. ISMAIL

b. H. ABD. KARIM

c. YA'QUB

d. ABD. HAMID

IV. DEWAN PENASEHAT

Ketua : KH. MAKKI NASIR

Wakil Ketua : KH. HASBULLAH MUHTAROM

Sekretaris : KH. DIMYATI MUHAMMAD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Sekretaris : KH. HASYIM ZUBAIR

Anggota :

a. KH. LATIF AMIN

b. KH. AKROM NAWAWI

c. KH. HUMRON MAULA

d. HOSUN, S.Pd

e. ALIMAN, S.Pd.I

f. FAUZAN JA'FAR, M.Si

g. SAFIUDDIN ASMURO, SH

adapun kegiatan pendidikan anti korupsi GP Ansor Kabupaten Bangkalan sebagai berikut, KH hasani zubair (28) menuturkan, untuk sumbangsih terhadap negara dalam mengentaskan pedidikan saya dengan pengurus GP ansor safari terhadap sekolah-sekolah SMA/MA/-MTS/SMP setiap bulan 1 kali mengkampanyekan bahaya korupsi dan perilaku korupsi dan memupuk kejujuran pada setiap siswa di sekolah- sekolah, baik itu tingkat SMP/Mts SMA/MA[69].

B. PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN BANGKALAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa adalah organisasi kemahasiswaan, PMII memunyai struktur dari tingkat pusat yang disebut Pengurus Besar (PB) yang ada dijakarta, mempunyai pengrus kordinator

[69] Wawancara dengan ketua gp ansor kabupaten bangkalan tanggal 22 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang di setiap provinsi se indonesia, mempunyai pengurus cabang di setiap kabupaten se indoneisa,

Adapun strukturnya PMII di kabupaten bangkalan sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUSUNAN PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
BANGKALAN
MASA KHIDMAT 2016/2017 M.

MAJELIS PEMBINA CABANG (MABINCAB)

Penasehat	: Drs.KH.M. Nuruddin A. Rahman, SH.
	KH. Zubair Muntashar
	KH. Fakhrillah Aschal, S.Pd.I
	KH. Wahab Jazuli
	KH. Syafi' Rofi'i
Ketua	: Ir.KH. Mondir Rofi'i
Wakil I	: Drs. KH.Moh. Hasan, M.Ag
Wakil II	: Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.S.
Sekretaris	: Moh Holifi, M.Pd.I
Sekretaris I	: Fauzan Jakfar S.Ag
Sekretaris II	: Hosun Mizan, S.Pd
Anggota	:
	Ma'sum Ya'ni, S.Pd.
	Ach. Jausi, M.A.
	Khotib Marzuki SE
	Mohammad Sanhaji, S.P.
	Maskur Hasyim, S.Pd.I
	Aminullah, S.E
	Muhtazzul Farid, S.Sos.
	Erfandi SH. MH
	Jamal Farid S.E
	Nadhifatul Qudsiyah
	Supyani, S.E.
	Mujiati Dewi, S.Pd
	Mufarrijul, SH. MH
	Muhlis, SH. MH
	Madra'I, M.Pd.I
	Safi'i, S.Pd.I
	H. Lukman, S.Pd.I
	Aliman Harish, S.Pd.I
	Mathur Husyairi, S.Ag
	Nanang Hidayat
	Hamidiyono, S.Pd.I
	Idrus Syamsi
	Maski Rizal, S.Pd
	Helmi Fuad, S.H.
	Abd. Manan, S.H.
	Mufti Shohib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Umum	: Bahiruddin
Ketua I	: Muhammad Saifur Rahman
Ketua II	: Syahril Abdillah
Ketua III	: Ahmad Afif
Sekretaris Umum	: Subaidi
Sekretaris I	: Hobir
Sekretaris II	: Fuad Fahmi
Sekretaris III	: Zainal Abidin
Bendahara	: Haris
Wakil Bendahara	: Siti Romlah

Biro – Biro

BIDANG INTERNAL

a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Hardiyanto Laksamana

Anggota :

1. Suryadi Arfa
2. Hafid

b. Biro Pendayagunaan Potensi Dan Kelembagaan Organisasi

Koordinator : Ahmad Mansur

Anggota :

1. Hamimah
2. Moh. Munir

c. Biro Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Profesional

Koordinator : Abd. Kohir

Anggota :

1. Nur Hasan
2. Mahmudi

BIDANG EKSTERNAL

a. Biro Hubungan Dan Komunikasi Pemerintah Dan Kebijakan Public

Koordinator : Syakroni

Anggota :

1. Rizal
2. Aziz

b. Biro Hubungan Dan Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan Dan Perguruan Tinggi

Koordinator : Sofyan Ali

Anggota :

1. Sallam
2. Ilham Rofiki

c. Biro Pengambangan Media Dan Informasi

Koordinator : Ahmad Sayadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota :

1. Bahri Abdullah
2. Abd. Rosyid

BIDANG KEAGAMAAN

a. Biro Dakwah dan Kajian Islam

Koordinator : Abdul Gofur

Anggota :

1. Aris Gunawan
2. Fadli

b. Biro Komunikasi dan Hubungan Pesantren

Koordinator : Abd. Karim MM

Anggota :

1. Amalina Syafatul U
2. Nur Alam MS

BADAN SEMI OTONOM

Korp PMII Putri

Ketua : Anisatul Khoiriyah

Sekretaris : Nailussa'adah Aviva

Bendahara : Fakhriyatun Nisak

Biro-biro

a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Erica Agustina

Anggota :

1. Anisa
2. Luluk Muflihah

b. Biro Wacana dan Pengembangan Intelektual

Koordinator : Nurotul Hidayah

Anggota :

1. Imamiah
2. Rohiyah

c. Biro Jaringan Komunikasi, Lembaga Advokasi, Media dan Jurnalistik

Koordinator : Masfufatun Nikmah

Anggota :

1. Rini Pujiarti
2. Mustafiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun program PMII cabang kabupaten Bangkalan dalam penerapan pendidikan anti korupsi antara lain,

1. mengadakan diskusi dengan mahasiswa lintas perguruan tinggi di kabupaten bangkalan, tentang bahaya korupsi dan mengatasinya setiap pada momentum diskusi diskusi non formal di PMII

2. melakukan seminar anti korupsi satu tahun 3 kali, dalam rangka edukasi preventif melawan budaya korupsi di kabupaten bangkalan

3. melakukan demonstrasi dalam rangka perlawanan terhadap para koruptor di kabupaten bangkalan.[70]

C. GELORA MAHASISWA PENYELAMAT RAKYAT

Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela [71]

Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatornya sebagai berikut

[70] Wawancara terhadap ketua pmii bahiruddin dan sekretaris PMII subaidi abdillah tanggal 25 oktober 2017

[71] Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kordinator kampus UTM : Bahiruddin
8. Kordinator kampus UINSA surabaya : Nurhakim
9. Kordinator kampus STKIP bangkalan : muhlis ali wafa
10. Kordinator STITAL bangakaln : Subaidi Abdillah
11. Kordinator kampus STITMU bangkalan : M syahril
12. Kordinator kampus STAMIDIYA bangkalan: Zubair

Adapun program program GEMPAR sebagai berikut :

4. Melaukan mimbar demokrasi. Dalam upaya kritik social dan menghancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyalis fuad amin
5. Melakukan demonstari terhadap DPRD agar memakzulkan atau mencopot Makmun Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merupakan putra fuad amin dan menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga melakukan praktek korupsi dengan sang ayah [72]
6. Melakukan diskusi public tentang pemotongan generasi koruptif dengan pihak APH, baik polisi maupun kejaksaan,

D. MADURA CORRUPTION WATCH (MCW)

MCW adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan Pemuda yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya memutus mata rantai kejahatan latin korupsi dan mempunya Misi

[72] Wawancara dengan bahirudin pada tanggal 28 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila.Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerinta”

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktrur MCW sebagai berikut :

8. Direktur : Syukur sabidin
9. Wakil direktur : M sholeh
10. Sekretaris : maratus solehah
11. Bendahara : Muhammad yusuf
12. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
13. Kordinator litbang : syaifullah
14. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

Adapun program MCW merupakan program yang Fokus pada permasalahan korupsi, seperti halnya :

3. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
4. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma, hokum,maupun juklak dan juknisnya program tersebut, contoh meminta RAB,SPJ dan bentuk eksekusi dari realisasi program pemerintah[73].

E. CENTRE OF ISLAMIC AND DEMOCRATION STUDIE'S (CIDE)

CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman,

Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organic, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan ABPD, penetapan APBD sampai pada tahap impelementasi dari program-program ABDP[74]

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi [75]

Adapun struktur CIDE kabupaten bangkalan sebagai berikut:

Pembina : Mathur husyairi

[73] Wawancara dengan direktur MCW Syukur sabidin pada tanggal 22 oktober 2017 di kabupaten bangkalan
[74] Wawancara dengan ketua cide. M shoim pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bagkalan
[75] Wawancara dengan sekretris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelindung : fauzan ja'far

Dewan pertimbangan : Hosun

9. Ketua : M soim

10. Wakil ketua : Nur hakim

11. Sekretaris : M ruji

12. Bendahara : umar jagat ali ulhaq

13. Devisi intelektual : toyyib

14. Devisi litbang : Eko wahyudi

15. Devisi advokasi : rofi'I

16. Devisi humas : mahsus ahmad

Adapun program-program cide tentang pendidikan anti korupsi sebagai berikut[76] ;

5. Melakukan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara melakukan investigasi program-program pemerintah yang terindikasi korup
6. Melakukan sosialisasi dan pendidikan korupsi terhadap para pemuda. Baik SMP, SMA sampai Mahasiswa
7. Melaporkan dan mengawal tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan dan kepolisian

[76] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA DI KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, ProvinsiJawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat[77].

Pelabuhan Kamal dan Jembatan suramadu merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (Pelabuhan Ujung). Saat ini telah beroperasi Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila.

Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening -Langkap - Modung dsb); budaya (Karapan sapi, dsb), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.

[77]Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 1.260,14 Km2. Secara geografis posisinya berada di antara 112º–113º BT dan 6º–7º LS yang dibatasi oleh Laut Jawa disebelah utara

Dengan luas wilayah mencapai 126.182 Ha, keadaan topografinya terdiri dari daerah landai seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45.236 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%). Adapun ketinggiannya berkisar antara 12 – 74 m dpl.

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bangkalan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 932.232 [78].

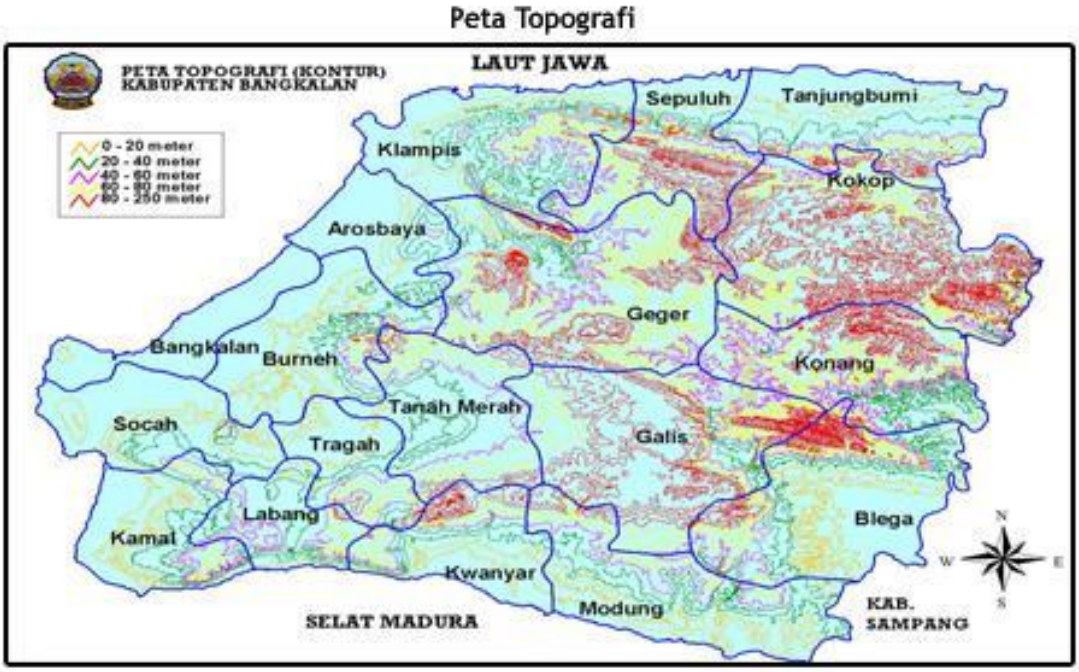

Figure 1peta kabupaten bangkalan

[78] Badan pusat statistic kabupaten bangkalan, Bangkalan dalam angka tahun 2014,25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan. Secara geologis, Kabupaten Bangkalan terdiri atas 4 (empat) macam batuan, yaitu alluvium, pleistosin fase sedimen, pleiosin fase gamping dan meiosin fase sedimen.

Berdasarkan peta tanah tinjau, secara umum jenis tanah di Kabupaten Bangkalan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tanah Zonal dan tanah Azonal. Kelompok tanah Zonal meliputi jenis alluvial, regosol dan litosol. Sedangkan Kelompok tanah Azonal meliputi jenis-jenis tanah yang sudah mengalami perkembangan secara lebih sempurna yaitu grumusol, mediteran dan lain sebagainya. Kemampuan tanah adalah sifat fisik tanah yang dibatasi oleh beberapa faktor yaitu kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, erosi, drainase,faktor-faktor pembatas tanah seperti tanah tertutup dan batu-batuan.

Luas tanah yang terkena erosi di Kabupaten Bangkalan seluas 37.232 Ha[79] (sekitar 29,81 %) dari luas wilayah Kabupaten Bangkalan. Di Kecamatan Kamal tidak dijumpai adanya erosi, sedangkan kecamatan yang telah terkena erosi lebih dari 50 % adalah Kecamatan Geger, Sepulu dan Galis. Namun, drainase tergenang periodik dan tergenang terus menerus tersebar sporadis di daerah pesisir, sedangkan seluruh wilayah kecamatan Burneh, Geger, Kokop, Tragah, Tanah Merah, Labang, Konang dan Galis drainasenya tidak pernah tergenang disebabkan karena fisiografinya berbukit-bukit.

[79] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kasus Korupsi Di Kabupaten Bangkalan

1. Kasus Korupsi kabupaten Bangkalan

a. Korupsi Skpd dan Kontraktor Kabupaten Bangkalan[80]

Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Bagus Hariyanto diciduk Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (20/7/2016) petang atas dugaan korupsi anggaran Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp 3,2 miliar di tahun 2014. Ia diperiksa mulai pukul 14.00 hingga 17.15 di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan.

b. Kasus Korupsi Kepala Camat dan Sekretaris dengan Kepala Desa dan Apatur[81]

Penyidik Polres Bangkalan terus mengembangkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah menetapkan tersangka pada MP (50), staf Kecamatan Tanjung Bumi, dalam kasus dugaan pemotongan dana desa (DD). Kemudian, giliran Camat Tanjung Bumi, JB (57), yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian polisi langsung menahan JB. Penetapan tersangka baru dalam kasus pemotongan DD ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi, termasuk JB.

"Peran JB menerima uang tunai dari tersangka MP, yang diduga kuat uang tersebut darihasil pemotongan anggaran DD, yang telah disisihkan

[80]https://nasional.tempo.co/read/827553/korupsi-proyek-taman-kota-jaksa-tahan-pejabat-bangkalan dikutip pada tanggal 23 desember 2017
[81]https://maduranewsmedia.com/terkini/camat-tanjung-bumi-terseret-kasus-ott-dijadikan-tersangka-kasus-korupsi-dana-desa/ dikutip tanggal 23 desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya," terang Kapolres Bangkalan, AKBP Anisullah M Ridha, Jumat (22/7/2016).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Riono Budi Santoso berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di bumi Bangkalan. Hanya saja, dia mengaku sedang memprioritaskan pada kasus-kasus korupsi yang memiliki nilai besar.

"Saat ini kami sedang memprioritaskan pada (kasus) yang memiliki nilai besar. Karena dampaknya lebih luas dan pengambilan (kerugian negara) lebih menguntungkan bagi masyarakat. Kasus-kasus lain juga terus kami perhatikan," terang Kajari di hadapan puluhan aktivis PMII Bangkalan yang sedang unjuk rasa di kantor Kejari, Kamis, 14/11/2016.

Menurutnya, saat ini Kejari Bangkalan tengah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus jalan kembar dan Taman Wisata Paseban. Pemeriksaan ini, sengaja dilakukan dalam waktu berbeda. Dalam pernyataan di depan aktivis muda NU Bangkalan ini, Riono juga membantah rumor yang menuding dirinya berperan dalam mutasi stafnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Nurul Hisyam.

Semua pemberitaan media local Bangkalan telah menyebarkan semua kasus korupsi yang ada di kabupaten Bangkalan. Dengan begitu, setiap lapisan masyarakat mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas telah mengetahui ketidaksehatan birokrasi yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Riono Budi Santoso sudah berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di bumi Bangkalan. Namun nyatanya perilaku korupsi di Bangkalan masih belum di katakan telah habis.

Maka dari itu. Kekuatan masyarakat madani (civil society) dan organisasi kepemudaan sangat diharap membantu proses pengurangan tindak pidana korupsi.

c. Kasus Korupsi yang Fantastis dari Fuad Amin Imron[82]

Fuad Amin tersangka kasus korupsi dengan oprasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dengan nilai korupsi fantastis yaitu Rp 414 miliar, sebanyak Rp 341 miliar di antaranya didapat Fuad Amin dari korupsi APBD selama 2003-2013. Namun, menurut Fuad, uang itu adalah sedekah sebagai uang darurat.

Sebagai bupati, Fuad meminta *fee* dari anggaran APBD yang diterima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 2003-2010 sebesar Rp 159,126 miliar dan 2010-2013 sebesar Rp 182,574 miliar. Alhasil, *fee* 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp 341 miliar.[83]

Fuad Amin merupakan tokoh dan mantan bupati kabupaten Bangkalan selama dua periode (2003-2014) setelah lepas dari jabatan Fuad Amin Imron mencalonkan dari anggota DPRD kabupaten Bangkalan periode 2014-2019, dalam pemilihan legislative fuad amin

[82] https://www.detik.com/tag/kasus-fuad-amin/ dikutp tanggal 23 desember 2017
[83] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imron terpilih menjadi anggota DPRD, dan menjadi pimpinan DPRD sebagai ketua. Sebab kekuatan fuad amin sangatlah kuat, beliau mempunyai pengaruh dan relasi terhadap tokoh, kiyai dan kepala desa se kabupaten bangkalan

Dalam persidangan, Fuad mengakui memiliki 21 mobil yang diatasnamakan orang lain. Alasannya untuk menghindari pajak progresif. Ia juga mengaku memiliki banyak apartemen atas nama keluarganya karena takut mati mendadak. "Apartemen atas nama Abdur Rouf, anak, dan istri. Saya sudah tua. Sehingga semua saudara ipar diberi apartmen satu-satu, khawatir jika meninggal mendadak," kata Fuad.[84]

Fuad juga mengakui banyak membeli tanah selama menjabat hingga 91 lokasi. Salah satunya di Cawang, Jakarta Timur, yang ia beli seharga Rp 49 miliar. Untuk membangun makam ayahnya, Fuad menggelontorkan uang Rp 36 miliar yang diambil dari APBD Bangkalan.

"Sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* UU 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan fakta hukum. Namun ternyata dalam perkara *a quo*, di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan menurut hukum bahwa harta kekayaannya yang telah disita oleh Penyidik KPK dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* bukan merupakan hasil tindak pidana, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a, Pasal 194 ayat 1, dan Pasal 197 ayat 1 huruf i

[84] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP, barang-barang bukti yang telah disita dirampas untuk kepentingan negara," ujar ketua majelis Salman Luthan yang diamini oleh anggota majelis MS Lumme dan Krisna Harahap.[85]

1. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA KABUPATEN BANGKALAN

Komunitas pemuda dan Implementasi Pendidikan anti korupsi kabupaten bangkalan

3. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan

Gerakan pemuda ansor merupakan salah satu badan otonom nahdlatul ulama, organisasi GP Ansor merupakan organisasi yang terstruktur dari tingkat pusat Dewan pengurus pusat (DPP) yang ada dijakarta, mempunyai dewan pimpinan wilayah di setiap provinsi se indonesia, mempunyai pengurus cabang di setiap kabupaten se indoneisa sampai ke ranting-ranting di setiap kelurahan dan desa,

Adapun strukturnya gp ansor di kabupaten bangkalan sebagai berikut

I. PENGURUS HARIAN

I. PENGURUS HARIAN

Ketua : H. HASANI ZUBAIR, S.IP., M.KP

Wakil Ketua I : H. FAHAD MUHAMMAD

[85] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Ketua II : H. MUZAWWIR, M.Th.I

Wakil Ketua III : H. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA

Wakil Ketua IV : H. MAKINUN AMIN

Wakil Ketua V : ABD. MUNIB, M.Pd.I

Wakil Ketua VI : SUPANDI AZZAURI

Wakil Ketua VII : ASIS, S.IP

Wakil Ketua VIII : H. MOH. HOLIFI, M.Pd.I

Sekretaris : ALI MUSTOFA, M.Pd.I

Wakil Sekretaris I : RIFQY ALI FAHMI, S.Pd.I

Wakil Sekretaris II : SAMSUL ARIFIN, SE

Wakil Sekretaris III : YUNUS MANSUR YASIN, S.Pd

Wakil Sekretaris IV : BADRUN, S.Sos

Wakil Sekretaris V : MUJIBUL KHOIRI, S.Sos

Wakil Sekretaris VI : SYAFI'I, S.Pd.I

Wakil Sekretaris VII : ACH. ZAINAL ABIDIN

Wakil Sekretaris VIII : AHMAD SYAKIR, S.Pd

Bendahara : MAHFUDZ ARIFIN, S.Ag

Wakil Bendahara : M. WAHYU, ST

Wakil Bendahara : RAHMAD, SE

Wakil Bendahara : MOCH. MAHRUS ALY

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

II. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

a. MASHUDI, SH, MH

b. ROHIM, SH, MH

c. MUHLIS, SH, MH

d. HAJATULLOH, SH, MH

2. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi

a. SANUSI, S.Pd.I

b. A. MUTAMTAM

c. EFENDI

d. AHMAD BBUSTANURRIDO, SE

e. H. ABD. ROHIM, SE

3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi

a. HAMIMUDDIN

b. HUSNI SYAKUR

c. ZAINUN NASIHIN

d. MANAB

4. Departemen Informasi, Iptek dan Kajian Strategi

a. ZAIRIL MUNIR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. SALMAN AL-FARISI, S.Kom

c. ABD. RAHMAN, ST

d. SURYADI, S.Pd.I

e. NUR HADI MUHNI

5. Departemen Lingkungan Hidup

a. RAFLI

b. NIZAR

c. JAMHARI

d. NASIHUL ABROR

e. MAHSUS, S.Pd.I

6. Departemen Olahraga dan Kebudayaan

a. M. ARIF ISMAIL

b. TOLIP, S.Pd.I

c. KHOLID, M.HI

d. SELI, S.S

e. H. MAHRUS

7. Departemen Agama dan Ideologi

a. H. IMAM MUSLIM

b. H. MUDI

c. H. M. SOLEH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. MUDABBIR MASHUDI

e. H. ABD. AZIZ

III. SEMI OTONOM

1. Satkocab Banser

Kepala : ABD. QODIR

Anggota:

a. ISMAIL

b. H. ABD. KARIM

c. YA'QUB

d. ABD. HAMID

IV. DEWAN PENASEHAT

Ketua : KH. MAKKI NASIR

Wakil Ketua : KH. HASBULLAH MUHTAROM

Sekretaris : KH. DIMYATI MUHAMMAD

Wakil Sekretaris : KH. HASYIM ZUBAIR

Anggota :

a. KH. LATIF AMIN

b. KH. AKROM NAWAWI

c. KH. HUMRON MAULA

d. HOSUN, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. ALIMAN, S.Pd.I

f. FAUZAN JA'FAR, M.Si

g. SAFIUDDIN ASMURO, SH

adapun kegiatan pendidikan anti korupsi GP Ansor Kabupaten Bangkalan sebagai berikut, KH hasani zubair (28) menuturkan, untuk sumbangsih terhadap negara dalam mengentaskan pedidikan saya dengan pengurus GP ansor safari terhadap sekolah-sekolah SMA/MA/-MTS/SMP setiap bulan 1 kali mengkampanyekan bahaya korupsi dan perilaku korupsi dan memupuk kejujuran pada setiap siswa di sekolah- sekolah, baik itu tingkat SMP/Mts SMA/MA[86].

4. Pergerakan mahasiswa islam Indonesia kabupaten bangkalan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa adalah organisasi kemahasiswaan, PMII memunyai struktur dari tingkat pusat yang disebut Pengurus Besar (PB) yang ada dijakarta, mempunyai pengrus kordinator cabang di setiap provinsi se indonesia, mempunyai pengurus cabang di setiap kabupaten se indoneisa,

Adapun strukturnya PMII di kabupaten bangkalan sebagai berikut

[86] Wawancara dengan ketua gp ansor kabupaten bangkalan tanggal 22 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUSUNAN PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
BANGKALAN
MASA KHIDMAT 2016/2017 M.

MAJELIS PEMBINA CABANG (MABINCAB)

Penasehat	: Drs.KH.M. Nuruddin A. Rahman, SH.
	KH. Zubair Muntashar
	KH. Fakhrillah Aschal, S.Pd.I
	KH. Wahab Jazuli
	KH. Syafi' Rofi'i
Ketua	: Ir.KH. Mondir Rofi'i
Wakil I	: Drs. KH.Moh. Hasan, M.Ag
Wakil II	: Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.S.
Sekretaris	: Moh Holifi, M.Pd.I
Sekretaris I	: Fauzan Jakfar S.Ag
Sekretaris II	: Hosun Mizan, S.Pd
Anggota	:
	Ma'sum Ya'ni, S.Pd.
	Ach. Jausi, M.A.
	Khotib Marzuki SE
	Mohammad Sanhaji, S.P.
	Maskur Hasyim, S.Pd.I
	Aminullah, S.E
	Muhtazzul Farid, S.Sos.
	Erfandi SH. MH
	Jamal Farid S.E
	Nadhifatul Qudsiyah
	Supyani, S.E.
	Mujiati Dewi, S.Pd
	Mufarrijul, SH. MH
	Muhlis, SH. MH
	Madra'I, M.Pd.I
	Safi'i, S.Pd.I
	H. Lukman, S.Pd.I
	Aliman Harish, S.Pd.I
	Mathur Husyairi, S.Ag
	Nanang Hidayat
	Hamidiyono, S.Pd.I
	Idrus Syamsi
	Maski Rizal, S.Pd
	Helmi Fuad, S.H.
	Abd. Manan, S.H.
	Mufti Shohib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Umum	: Bahiruddin
Ketua I	: Muhammad Saifur Rahman
Ketua II	: Syahril Abdillah
Ketua III	: Ahmad Afif
Sekretaris Umum	: Subaidi
Sekretaris I	: Hobir
Sekretaris II	: Fuad Fahmi
Sekretaris III	: Zainal Abidin
Bendahara	: Haris
Wakil Bendahara	: Siti Romlah

Biro – Biro

BIDANG INTERNAL

a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Hardiyanto Laksamana

Anggota :

1. Suryadi Arfa
2. Hafid

b. Biro Pendayagunaan Potensi Dan Kelembagaan Organisasi

Koordinator : Ahmad Mansur

Anggota :

1. Hamimah
2. Moh. Munir

c. Biro Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Profesional

Koordinator : Abd. Kohir

Anggota :

1. Nur Hasan
2. Mahmudi

BIDANG EKSTERNAL

a. Biro Hubungan Dan Komunikasi Pemerintah Dan Kebijakan Public

Koordinator : Syakroni

Anggota :

1. Rizal
2. Aziz

b. Biro Hubungan Dan Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan Dan Perguruan Tinggi

Koordinator : Sofyan Ali

Anggota :

1. Sallam
2. Ilham Rofiki

c. Biro Pengambangan Media Dan Informasi

Koordinator : Ahmad Sayadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota :

1. Bahri Abdullah
2. Abd. Rosyid

BIDANG KEAGAMAAN

a. Biro Dakwah dan Kajian Islam

Koordinator : Abdul Gofur

Anggota :

1. Aris Gunawan
2. Fadli

b. Biro Komunikasi dan Hubungan Pesantren

Koordinator : Abd. Karim MM

Anggota :

1. Amalina Syafatul U
2. Nur Alam MS

BADAN SEMI OTONOM

Korp PMII Putri

Ketua : Anisatul Khoiriyah

Sekretaris : Nailussa'adah Aviva

Bendahara : Fakhriyatun Nisak

Biro-biro

a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Erica Agustina

Anggota :

1. Anisa
2. Luluk Muflihah

b. Biro Wacana dan Pengembangan Intelektual

Koordinator : Nurotul Hidayah

Anggota :

1. Imamiah
2. Rohiyah

c. Biro Jaringan Komunikasi, Lembaga Advokasi, Media dan Jurnalistik

Koordinator : Masfufatun Nikmah

Anggota :

1. Rini Pujiarti
2. Mustafiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun program PMII cabang kabupaten Bangkalan dalam penerapan pendidikan anti korupsi antara lain,

1. mengadakan diskusi dengan mahasiswa lintas perguruan tinggi di kabupaten bangkalan, tentang bahaya korupsi dan mengatasinya setiap pada momentum diskusi diskusi non formal di PMII

2. melakukan seminar anti korupsi satu tahun 3 kali, dalam rangka edukasi preventif melawan budaya korupsi di kabupaten bangkalan

3. melakukan demonstrasi dalam rangka perlawanan terhadap para koruptor di kabupaten bangkalan[87]

5. Gelora mahasiswa penyelamat rakyat

   Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela [88]

   Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatornya sebagai berikut

   13. Kordinator kampus UTM : Bahiruddin

[87] Wawancara terhadap ketua pmii bahiruddin dan sekretaris PMII subaidi abdillah tanggal 25 oktober 2017

[88] Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Kordinator kampus UINSA surabaya : Nurhakim
15. Kordinator kampus STKIP bangkalan : muhlis ali wafa
16. Kordinator STITAL bangakaln : Subaidi Abdillah
17. Kordinator kampus STITMU bangkalan : M syahril
18. Kordinator kampus STAMIDIYA bangkalan: Zubair

Adapun program program GEMPAR sebagai berikut :

7. Melaukan mimbar demokrasi. Dalam upaya kritik social dan menghancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyalis fuad amin
8. Melakukan demonstari terhadap DPRD agar memakzulkan atau mencopot Makmun Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merupakan putra fuad amin dan menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga melakukan praktek korupsi dengan sang ayah [89]
9. Melakukan diskusi public tentang pemotongan generasi koruptif dengan pihak APH, baik polisi maupun kejaksaan,

6. Madura corruption watch (MCW)

MCW adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan Pemuda yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya memutus mata rantai kejahatan latin korupsi dan mempunya Misi

[89] Wawancara dengan bahirudin pada tanggal 28 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila.Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerinta”

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktrur MCW sebagai berikut :

15. Direktur : Syukur sabidin
16. Wakil direktur : M sholeh
17. Sekretaris : maratus solehah
18. Bendahara : Muhammad yusuf
19. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
20. Kordinator litbang : syaifullah
21. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

Adapun program MCW merupakan program yang Fokus pada permasalahan korupsi, seperti halnya :

5. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
6. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma, hokum,maupun juklak dan juknisnya program tersebut, contoh meminta RAB,SPJ dan bentuk eksekusi dari realisasi program pemerintah[90].

7. CENTRE OF ISLAMIC AND DEMOCRATION STUDIE'S (CIDE)

CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman,

Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organic, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan ABPD, penetapan APBD sampai pada tahap impelementasi dari program-program ABDP[91]

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi [92]

Adapun struktur CIDE kabupaten bangkalan sebagai berikut:

Pembina : Mathur husyairi

[90] Wawancara dengan direktur MCW Syukur sabidin pada tanggal 22 oktober 2017 di kabupaten bangkalan
[91] Wawancara dengan ketua cide. M shoim pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bagkalan
[92] Wawancara dengan sekretris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelindung : fauzan ja'far

Dewan pertimbangan : Hosun

17. Ketua : M soim

18. Wakil ketua : Nur hakim

19. Sekretaris : M ruji

20. Bendahara : umar jagat ali ulhaq

21. Devisi intelektual : toyyib

22. Devisi litbang : Eko wahyudi

23. Devisi advokasi : rofi'I

24. Devisi humas : mahsus ahmad

Adapun program-program cide tentang pendidikan anti korupsi sebagai berikut[93] ;

8. Melakukan perlawanan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara melakukan investigasi program-program pemerintah yang terindikasi korup
9. Melakukan sosialisasi dan pendidikan korupsi terhadap para pemuda. Baik SMP, SMA sampai Mahasiswa
10. Melaporkan dan mengawal tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan dan kepolisian

8. PEMUDA BANGKALAN BERSATU (PBB)

PBB juga merupakan organisasi local yang tidak mempunyai struktur sampai pusat. Organisasi aatau LSM PBB terletak di kabupaten bangkalan. PBB banyak berorientasi pada kegiatan kegiatan politik, sehingga kegiatan PBB ini

[93] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat tampak ketika ada even poltik local, seperti pemilihan bupati, gubernur, presiden dan legislative.

PBB selalu memonitoring setiap kegiatan politik dalam hal (money politik. Grativikasi dll yang bersifat sogok menyogok)

LSM PBB sangat lantang menyuarakan tentang politik bersih, jujur dan adil, sampai pada akhirnya, ketua dari PBB kena bacok, sebab di anggap menantang penguasa ketika pemilihan bupati pada tahun 2014 dulu[94]

Adapun struktur PBB sebagai berikut :

1. Ketua : Mahmudi Ibnu Hotib
2. Sekretaris : rohman elzarazi
3. Bendahara : umrotul jannah
4. Ketua bidang : junaidi asmuro
5. Bidang advokasi : burawi
6. Bidang litbang : maratus solihah
7. Bidang keilmuan : hoiron ghazan

Adapun kegiatan pendidikan anti korupsi PBB sebagai berikut :

1. Melakukan kajian keilmuan tentang bagaimana korupsi itu terjadi dengan pemuda pemudi kabupaten bangkalan
2. Melakukan demonstrasi
3. Memanfaatkan kecanggihan media social untuk mengkampanyekan politik, jujur dan adil tanpa sogok menyogok

[94] Wawancara dengan ketua PBB mahmudi ibnu hotib di kabupaten bangkalan ada tanggal 28 oktober 2017 di kabupaten bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSIKOMUNITAS PEMUDA

1. Teori Relasi Kekuasaan Dan Motif Korupsi

Teori Micehal Foucault (relasi kekuasaan) memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa kekuasaan sangatlah berpotensi untuk melakukan penyelewangan, dalam konteks korupsi kekuasaan merupakan actor absolute yang memberikan peluang melakukan tindak pidana korupsi, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau itu tidak "menguntungkan" pribadi, kelompok dan relasinya maka kebijakan tersebut tidak akan dikeluarkan.

Korupsi dan kekuasaan, merupakan hal yang selalu melekat. Banyak kejadian yang mengafirmasi Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan begitupun sebaliknya yang terjadi kekuasaan merupakan tangga bagi tindak korupsi. Dan hal itu pernah di ungkapkan oleh Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

Dan benar saja. Semua perilaku korupsi di kabupaten bangkalan tidak pernah lepas dari kekuasaan dan relasi-relasinya. Pada contoh pertama di data korupsi bangkalan. Ada korupsi ADD dan DD. Dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melibatkan pihak kecamatan, dan aparatur desa di kecamatan tanjung bumi kabupaten bangkalan. hal ini mempertegas bahwa korupsi yang terjadi.

Dalam kasus ini, merupakan kongkalikong antara beberapa Relasi dari penguasa local. Dalam prakteknya dari pihak kecamatan akan memuluskan keluarnya DD dengan konsekuensi free 20%. Begitu juga setelah dipotong 20% dana itu turun ke desa dan akan direalisasikan sebesar 40%, dengan mengondisikan inspektorat dan APH yang menangani. Korupsi tersebut terjadi karena memang ada relasi sistemik yang sangat kental, sehingga sangat gampang dalam melakukan korupsi

Begitu juga kasus korupsi yang menimpa kontraktor dan pihak devisi hokum kabupaten bangkalan dalam proyek pembangunan taman paseban di kabupaten bangkalan. Terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut, berawal dari hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 525 juta dalam pengerjaan proyek Taman Paseban. Dalam kasus tersebut setelah

Yang menjadi terpidana yaitu H Humaidi, pelaksana proyek; Karsono, pemborong; dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Majelis hakim menyatakan, ketiga terpidana melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001.Lagi-lagi kasus korupsi ini mengafirmasi bahwa relasi kekuasaan sangat berkontribusi terhadap terjadi tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai-sampai bupati bangkalan makmun ibnu fuad (2013-2018) dijadikan saksi dalam persidangan sebab pejabatnya salah satu menjadi tersangka.

Kasus korupsi selanjutnya adalah korupsi yag fantastis yaitu korupsi yang dilakukan oleh fuad Amin selaku bupati bangkalan dua periode (2003-2009.2009-2013) dan ketua DPRD bangkalan periode 2014-2019. Fuad amin adalah politisi senior yang sudah malang melintang, sebelum menjadi bupati bangkalan Fuad menjadi DPR RI. Dalam kasus korupsi fuad amin mengokohkan teori relasi kekuasaan, bahwa semua yang keluar dari kekuasaan bukan lah tongkosong, melainkan semua terskenario dan sistematis

KPK melakukan penangkapan terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron (FAI) yang diduga menerima pemberian uang dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko (ABD). Selain itu, KPK juga menangkap 2 orang sebagai perantara keduanya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyebutkan bahwa uang senilai Rp 700 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu itu ditemukan pada seorang perantara dari Antonio yaitu Rauf (RF). Uang itu diduga merupakan hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Jawa Timur.

Berikut kronologi yang disampaikan oleh Bambang saat konferensi pers di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014):

1. Senin (1/12/2014) pukul 11.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertempat di parkiran di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, Gedung A dilakukan penangkapan terhadap Rauf dan ditemukan uang senilai Rp .juta dalam sebuah mobil 700 Diduga uang itu adalah pemberian dari Antonio untuk Fuad melalui Rauf (ajudan Antonio).

2. Senin (1/12/2014) pukul 11.45 WIB

   Bertempat di lobi Gedung A di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Antonio

3. .Senin (1/12/2014) pukul 12.15 WIB

   Bertempat di lobi Gedung EB, Jakarta dilakukan penangkapan terhadap Koptu Darmono (oknum TNI AL/perantara Fuad).

4. Selasa (2/12/2014) pukul 01.00 WIB

   Bertempat di Bangkalan, Madura, dilakukan penangkapan terhadap Fuad di kediamannya. Selain itu juga disita uang sebanyak 3 tas koper besar (jumlahnya masih dihitung) yang diduga juga pemberian.

5. Selasa (2/12/2014) sekitar pukul 10.00 WIB

   Fuad dibawa ke Gedung KPK dan langsung menjalani pemeriksaan intensif.

Di dalam persidangan terungkap bila Fuad Amin meminta fee 10 persen APBD yang digunakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu dasawarsa.

"Fee 10 persen dari anggaran APBD yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2003-2010 sebesar Rp 159,126 miliar," kata ketua majelis Salman Luthan. Adapun fee dari anggaran APBD yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2010-2013 sebesar Rp 182,574 miliar. Alhasil, fee 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp 341 miliar.

Fuad Amin juga menjadi tersangkan dalam kasus suap migas. Suap bermula ketika PT MKS ketika hendak membeli gas alam di Blok Poleng, Bangkalan. Pada saat yang bersamaan, Perusahaan Daerah Sumber Daya (PD SD) juga menginginkan hal yang sama. Kemudian, Bambang melobi Fuad agar PT MKS dapat membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan. Fuad Amin pun sepakat untuk membantu Selain itu,

Fuad juga memberikan dukungan PT MKS kepada Kodeco Energy, Co Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Untuk merealisasikan permohonan tersebut, baik PT MKS maupun PD SD sepakat membuat nota perjanjian. Akhirnya, PT MKS dan PD SD menandatangani surat perjanjian konsorsium pemasangan pipa gas alam di Gresik dan Gili Timur.

Fuad Amin mengarahkan perjanjian konsorsium PT MKS dengan PD Sumber Daya dan memberikan surat dukungan permohonan alokasi Kodeco sehingga PT MKS memperoleh alokasi gas alam dari PT Pertamina EP. Tak berselang lama, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS. Pada tanggal 5 September 2007, PT Pertamina EP dan PT MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur, Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas bantuan tersebut, Bambang menyetorkan duit dalam bentuk tunai dan melalui transfer ke beberapa rekening yang telah ditentukan oleh Fuad. Selain Fuad, untuk penyetoran duit tunai juga diserahkan melalui ajudannya, Abdul Rauf dan seseorang bernama Taufik. Setoran terbagi dalam dua kategori, yakni setoran bulanan dan setoran insidentil.

Bambang dalam sidang untuk terdakwa lainnya, sempat mengaku uang bulanan untuk Fuad ditransfer ke rekening Fuad sementara permintaan insidentil disetorkan ke rekening orang lain yang telah ditentukan Fuad.

Mulanya, Bambang menyerahkan duit sebanyak Rp 50 juta tiap bulan secara tunai. Duit diberikan sejak medio tahun 2009 hingga Juni 2011. Setelah itu, nominal duit pelicin melonjak empat kali lipat menjadi Rp 200 juta sejak Juli 2011 hingga akhir Desember 2013.

Tak berhenti di situ, melonjaknya duit suap kembali terjadi menjadi Rp 600 juta mulai Januari 2014 hingga November 2014. Selain duit rutin, PT MKS juga terbukti menyetor duit suap secara temporer. Duit yang disetor sedikitnya senilai Rp 6 miliar baik melalui sejumlah kerabat maupun langsung kepada dirinya.

Fuad didakwa melanggar Pasal 12a dan 12b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua tindak pidana korupsi begitu gampang dilakukan fuad amin, sebab fuad amin menjadi super power. Dia bisa mengendalikan semua SKPD sampai DPRD. Ini bukti bahwa relasi kekuasaan fuad menjadi jembatan untuk melakukan korupsi. Begitu juga ketika di bedah melalui teori Motif social. Jelas yang di lakukan oleh para koruptor diatas tidak terlepas dengan motif. Baik itu motif pingn berkuasa dan mengendalikan semua. Begitu juga motif prestasi, contoh fuad amin. Fuad amin bukan hanya berkuasa di pemerintahan, akan tetapi fuad mampu menguasai semua elemen masyarkat. Baik itu tokoh masyarakat, para Kiyai, Kepala desa.

Motif akan hasrat selalu berkuasa jelas terpampang dari jejak rekam politiknya. Setelah dia melepas jabatan Bupati selama dua periode, fuad tidak serta merta membiarkan anaknya menjabat bupati. Akan tetapi fuad juga berhasrat tetap mengondisikan dengan cara menjadi ketua DPRD kabupaten Bangkalan.

2. IMPLIKASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Teori kausalitas mengajarkan pada kita, bahwa tidak ada kejadian tanpa ada sebab. Begitu juga dalam kehidupan social. Perlu diketahui tertangkapnya Fuad Amin melalui pernyataan Bambang selaku wakil KPK, Fuad Amin tertangkap atas laporan masyarakat.

Perjuangan teman-teman aktivis di kabupaten bangkalan membuahkan hasil. Selain bisa membuka tabir kepalsuan tentang korupsi. Komunitas pemuda juga memberikan efek takut kepada penguasa untuk sewenang-wenang melakukan tindak pidana korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itu terbukti setelah para pemuda aktivis sering melakukan edukasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi baik secara formal dan non formal, masyarakat umum banyak mengetahui apa itu korupsi dan apa itu bahaya korupsi

Husus di bangkalan, penerapan pendidikan anti korupsi secara non formal oleh beberapa komunitas pemuda memberikan implikasi atau efek salah satunya sebagai berikut :

1. pembenahan preventif

   Korupsi sudah menggrogoti negara Indonesia di semua segmen dan sangat kompleks, bisa dikatakan setiap hari media social memberikan tontonan pada masyarakat bagaimana korupsi itu terjadi, sehingga kadang pula ada rasa menyerah dan tidak akan bisa membasmi korupsi di negara Indonesia

   Namun dengan hadirnya pendidikan anti korupsi seakan memberikan udara segar dan harapan baru untuk membasmi prilaku korupsi, setidaknya pendidikan korupsi sebagai pemutus mata rantai generasi koruptif menuju generasi emas. Kenapa demikian, sebab pendidikan korupsi akan memberikan efek kesadaran semenjak dini, agar kita menjauhi perilaku korupsi. Negara kaya menajdi negara miskin. Negara yang seharusnya maju akan menjadi negara berkembang dan tertinggal. Dan yang paling terpenting korupsi adalah perilaku Haram yang dilarang agama

2. penyadaran masyarakat

   kadang kala perilaku korupsi dilakukan karena atas dasar ketidak tahuan, seperti contoh memberikan hadiah pada pejabat. Menjanjikan uang apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat membantu, padahal itu adalah tugasnya sebagai pejabat, pelayan public.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang telah disosialisasikan oleh teman-teman komunitas pemuda. Pada saat ini masayrakat bangkalan banyak mengetahui mana itu perilaku korupsi dan yang bukan korupsi. Contoh dipedesaan masayarakat sudah tau apa itu Pungli (pungutan liar) terutama yang hidup dikota-kota di kabupaten bangkalan. Mereka sudah sadar bahwa bukan hanya yang di sogok. Yang menyogok pun telah melakukan perilaku koruptif dan salah

3. Timbulnya gerakan masyarakat

   Dulu di masa rezim Fuad amin gerakan masayarakat hingga mahasiswa nyaris tidak terdengar, walaupun pada saat ini praktek korupsi sudah menjadi rahasia umum. Sampai pada akhirnya banyak pemuda membuat komunitas dan adanya kebijakan pendidikan anti korupsi dari pemerintah. Hal ini sebagai symbol akademis untuk melakukan perlawanan yang legal secara yurisprodensi. Sehingga setelah pemudan membuat komunitas ditopang dengan kurikulum pendidikan anti korupsi. Timbullah gerakan masayrakat. Baik gerakan tersebut melalui media social maupun gerakan demonstrasi.

4. Pejabat ketakutan

   Seperti narasi sebelumnya, bahwa sebelum ada peran komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi. Pejabat kabupaten bangkalan dengan gampang melakukan korupsi tanpa ada rasa takut dan hawatir di penjara. Namun setelah adanya pendidikan anti korupsi, dan puncaknya setelah fuad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amin ditangkap OTT oleh KPK para penguasa dan pejabat merasa ketakutan dengan gelombang gerakan masyarakat yang tau tentang korupsi. Sebab pemuda bangkalan saat ini tidak akan segan segan mendemo dan melaporkan kepaada aparat penegak hokum (APH)

5. Menjadi diskusi sehari hari

   Jika dulu sebelum disahkanya pendidikan anti korupsi masyarakat seakan males dan tidak kejelasan tentang pendidikan korupsi akhirnya saat ini pemuda pemudi bangkalan sering berdiskusi dan dijadikan diskursus bersama tentang pendidikan anti korupsi

6. Pembentukan moral dan pemutus rantai generasi koruptif

   Korupsi sudah di ibaratkan kecanduan sabu sabu pada saat ini. Mereka korupsi bukan hanya ada kesempatan, tetapi mereka membuat kesempatan dan peluang untuk melakukan korupsi. Sehingga sangat sulit untuk membenahi kondisi sperti ini. Maka solusinya adalah mengubah karakter dan memperkuat moralitas. Pendidikan anti korupsi merupakan solusi untuk memutus rantai generasi korupsi. Dengan penerapan pendidikan anti korupsi hal ini akan membentuk moral dan menjadikan generasi selanjutnya menjadi generasi yang bertanggung jawab, bermoral dan clean and good dan mereka berkata NO terhadap korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Teori Micehal Foucault (relasi kekuasaan) memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa kekuasaan sangatlah berpotensi untuk melakukan penyelewangan, dalam konteks korupsi kekuasaan merupakan actor absolute yang memberikan peluang melakukan tindak pidana korupsi, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau itu tidak "menguntungkan" pribadi, kelompok dan relasinya maka kebijakan tersebut tidak akan dikeluarkan.

   Korupsi dan kekuasaan, merupakan hal yang selalu melekat. Banyak kejadian yang mengafirmasi Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan begitupun sebaliknya yang terjadi kekuasaan merupakan tangga bagi tindak korupsi. Dan hal itu pernah di ungkapkan oleh Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

   Dan benar saja. Semua perilaku korupsi di kabupaten bangkalan tidak pernah lepas dari kekuasaan dan relasi-relasinya. Pada contoh pertama di data korupsi bangkalan. Ada korupsi ADD dan DD. Dalam hal ini melibatkan pihak kecamatan, dan aparatur desa di kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanjung bumi kabupaten bangkalan. hal ini mempertegas bahwa korupsi yang terjadi.

Dalam kasus ini, merupakan kongkalikong antara beberapa Relasi dari penguasa local. Dalam prakteknya dari pihak kecamatan akan memuluskan keluarnya DD dengan konsekuensi free 20%. Begitu juga setelah dipotong 20% dana [122] run ke desa dan akan direalisasikan sebesar 40%, dengan mengondisikan inspektorat dan APH yang menangani. Korupsi tersebut terjadi karena memang ada relasi sistemik yang sangat kental, sehingga sangat gampang dalam melakukan korupsi

Begitu juga kasus korupsi yang menimpa kontraktor dan pihak devisi hokum kabupaten bangkalan dalam proyek pembangunan taman paseban di kabupaten bangkalan. Terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut, berawal dari hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 525 juta dalam pengerjaan proyek Taman Paseban. Dalam kasus tersebut setelah

Yang menjadi terpidana yaitu H Humaidi, pelaksana proyek; Karsono, pemborong; dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Majelis hakim menyatakan, ketiga terpidana melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Lagi-lagi kasus korupsi ini mengafirmasi bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relasi kekuasaan sangat berkontribusi terhadap terjadi tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini sampai-sampai bupati bangkalan makmun ibnu fuad (2013-2018) dijadikan saksi dalam persidangan sebab pejabatnya salah satu menjadi tersangka.

2. Teori kausalitas mengajarkan pada kita, bahwa tidak ada kejadian tanpa ada sebab. Begitu juga dalam kehidupan social. Perlu diketahui tertangkapnya Fuad Amin melalui pernyataan Bambang selaku wakil KPK, Fuad Amin tertangkap atas laporan masyarakat.

   Perjuangan teman-teman aktivis di kabupaten bangkalan membuahkan hasil. Selain bisa membuka tabir kepalsuan tentang korupsi. Komunitas pemuda juga memberikan efek takut kepada penguasa untuk sewenang-wenang melakukan tindak pidana korupsi

   Itu terbukti setelah para pemuda aktivis sering melakukan edukasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi baik secara formal dan non formal, masyarakat umum banyak mengetahui apa itu korupsi dan apa itu bahaya korupsi

   Husus di bangkalan, penerapan pendidikan anti korupsi secara non formal oleh beberapa komunitas pemuda memberikan implikasi atau efek

   a. Pembenahan preventif
   b. Penyadaran masyarakat
   c. Timbulnya gerakan masyarakat
   d. Pejabat ketakutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menjadi diskusi sehari hari

f. Pembentukan moral dan pemutus rantai generasi koruptif

B. Saran

1. Pemehaman teori relasi kekuasaan dan motif sosial sangatlah penting dalam pembekalan untuk mengimpelementasikan pendidikan anti korupsi, sebab penerapan pendidikan anti korupsi bagi para komunitas pemuda pendidikan anti korupsi perlu analisis yang tepat, agar program yang di terapkan kena dan efektif
2. Dari hasil penelitian akademik yang dilakukan penulis, penulis menemukan kekurangan para komunitas pemuda dalam penerapan pendidikan anti korupsi, yaitu kurangnya merangkul para pejabat dan penegak hokum setempat. Dan hal iitu sangatlah penting, mengingat mereka juga menentukan efektif dan tidaknya pendidikan anti korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul.*Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*.Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP, 2006.

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Azhar, Muhammad, dkk. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta:LP3 UMY, 2004.

Azwar, Syaifuddin.*Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B.N,Agoes Patub.*Modul Seminar "Peran Komunitas Musik Etnik Dalam Agoes Patub B.N"*. Yogyakarta : Komunitas Suling Bambu Nusantara, 2011.

Badan Pusat Statistic Kabupaten Bangkalan.*Bangkalan dalam angka tahun 2014.*

Berens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Best, Steven,& Douglas Kellner, *Teori Postmodern, Interogasi Kritis*. Terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing, 2003.

Cazurra, Alvaro Cuervo. "The Effectiveness of Laws Against Bribery Abroad." Journal of International Business Studies. 2008.

Creswell, Jhon W. *Research Design Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed*. Terj, Achmad Fawaid. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015.

Dharma,Budi.*Korupsi dan Budaya.* Kompas. 25/10/2015.

Ghafur, Syaiful Amin.*Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 01, No. 01, Juni 2009.

Handoyo,Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya, 2009.

Harahap, Krisna.*Pemberantasn Korupsi Pada Masa Reformasi*dalam Jurnal of Historical Studies X Juni 2009.

Hasan, M. Iqbal.*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasbiansyah. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dalam Komunikasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaffsoff.*Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat.*Terj. Soenarjo Soemargono. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996.

Kaswardi, EM. K. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000.* Jakarta : PT. Grasindo, 1993.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk MemahamiTindak Pidana Korupsi*.Jakarta: t.p. 2009.

Lodico, Marguerite G, dkk.*Methods in Educational Research From Theory to Practice*. San Fransisco: Jossey Bass, 2006.

Majalah AULA No.01 tahun XXXI Januari 2009.

Mansyur, Cholil.*Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota.*Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

McClelland, David C.*The Achieving Society*. NJ: Van Nostrand Company Inc, 1961.

Modern Didactic Center.*Anti Corruption Education At School.*Vilnius Lathuania : Gerneish Publishing, 2008.

Nasir, Ridlwan.*Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*.Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006.

Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmia.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Partanto, Pius A,& M Dahlan Al Barry.*Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola, 2004.

Sarwono, Sarlito Wirawan.*Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono.*Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1975.

Soros, George. *Open Society; Reforming Global Capitalism.* Jakarta: t.p, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Sulistiyani, Ambar Teguh.*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutrisno, Muji, dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta:Kanisius, 2005.

Suyahmo,*Korupsi dalam Perspektif Pancasila*.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum.Semarang: Rumah Indonesia, 2006.

Zainudin, A Rahman.*Kekuasaan dan Negara*: *Pemikiran Politik Ibnu Kaldun.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04.

Harahap, *Reformasi*
http://maduranewsmedia.com/terkini/camat-tanjung-bumi-terseret-kasus-ott-dijadikan-tersangka-kasus-korupsi-dana-desa/ dikutip tanggal 23 desember 2017

https://nasional.tempo.co/read/827553/korupsi-proyek-taman-kota-jaksa-tahan-pejabat-bangkalan di kutip pada tanggal 23 desember 2017

https://www.detik.com/tag/kasus-fuad-amin/ dikutip tanggal 23 desember 2017

Wawancara dengan Bahirudin pada tanggal 28 oktober 2017

Wawancara dengan direktur MCW Syukur Sabidin pada tanggal 22 oktober 2017 di kabupaten Bangkalan.

Wawancara dengan ketua cide. M Shoim pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten Bagkalan.

Wawancara dengan ketua gp Ansor kabupaten Bangkalan tanggal 22 oktober 2017.

Wawancara dengan ketua PBB Mahmudi Ibnu Hotib di kabupaten Bangkalan ada tanggal 28 oktober 2017 di kabupaten Bangkalan.

Wawancara dengan sekretris cide M. Ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten Bangkalan.

Wawancara dengan Syahril, Muhlis Ali Wafa dan Zubair di kabupaten Bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017.

Wawancara terhadap ketua PMII Bahiruddin dan sekretaris PMII Subaidi Abdillah tanggal 25 oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id